



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NELVI RAHMADANI

NIM. 11970524745

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nelvi Rahmadani
NIM : 11970524745
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai

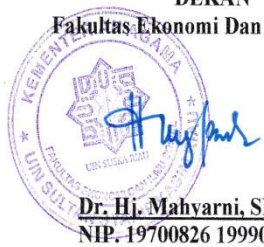
DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nelvi Rahmadani
NIM : 11970524745
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA



Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si



Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si



Sekretaris
Mashuri, MA





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melvi Rahmadani
 NIM : 11970524745
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 25 November 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
 Collaborative Governance Dalam Penanggulangan
 Banjir di Kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Melvi Rahmadani
 Melvi Rahmadani
 NIM : 11970524745

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI

Oleh :

Nelvi Rahmadani

NIM. 11970524745

Penanggulangan banjir di Kota Dumai masih belum optimal sehingga intensitas banjir yang terjadi masih cukup tinggi. Banjir yang terjadi di Kota Dumai membawa dampak yang cukup serius. Dalam jangka pendek banjir dapat menghambat aktivitas harian masyarakat, melemahkan kegiatan jual beli, dan memunculkan masalah kesehatan yang terkadang menelan korban jiwa. Dalam jangka panjang banjir dapat merusak lingkungan serta mempersulit perolehan air bersih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Dinas Pariwisata Kota Dumai dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya sudah ada kolaborasi yang dilakukan untuk menanggulangi banjir di Kota Dumai. Pemangku kepentingan sadar akan keterbatasan kewenangan sehingga memunculkan pembagian tugas yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder. Tupoksi tersebut tertuang pada penandatanganan perjanjian kerjasama sehingga para pemangku kepentingan fokus untuk melaksanakan kewajibannya sendiri untuk mencapai keefektifan dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai. Di sisi lain masih terdapat stakeholder yang tidak kompeten dalam proses kerjasama dikarenakan pergantian jabatan sehingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi tersebut tidak mengetahui secara pasti tupoksi yang harus mereka jalankan. Hal ini menyebabkan keterlambatan informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan sehingga menghambat proses koordinasi dalam melakukan kolaborasi untuk penanggulangan banjir di Kota Dumai.

Kata Kunci: Collaborative Governance; Banjir; Penanggulangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN FLOOD MANAGEMENT IN DUMAI CITY

Oleh :

Nelvi Rahmadani

NIM. 11970524745

Flood management in Dumai City is still not optimal so that the intensity of the floods that occur is still quite high. The floods that occurred in Dumai City had quite a serious impact. In the short term, flooding can hamper people's daily activities, weaken buying and selling activities, and cause health problems that sometimes claim lives. In the long run, flooding can damage the environment and make it difficult to obtain clean water. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The key informants in this study were the Dumai City Public Works and Spatial Planning Office, the Dumai City Regional Disaster Management Agency, the Dumai City Environment Service, the Dumai City Tourism Office and the Riau Natural Resources Conservation Center. The results of this study indicate that collaboration has been carried out to deal with flooding in the City of Dumai. Stakeholders are aware of the limited authority that creates a division of tasks that can be carried out by each stakeholder. The main tasks and functions are stated in the signing of the cooperation agreement so that stakeholders focus on carrying out their own obligations to achieve effectiveness in flood prevention in the City of Dumai. On the other hand, there are still stakeholders who are incompetent in the collaboration process due to changes in position so that the human resources owned by these agencies do not know exactly what functions they must carry out. This causes delays in information being received by stakeholders thereby hampering the coordination process in conducting collaboration for flood control in the City of Dumai

Keywords: Collaborative Governance; Flood; Countermeasure

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, karunia, hidayah, dan inayah-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini berjudul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI*”. Selanjutnya skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Ibrahim dan Ibunda Agustina, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk merasakan manisnya kasih dan sayang, terima kasih telah berjuang untuk setiap langkah di kehidupan penulis dengan penuh kesabaran, ketabahan, cinta, dan do'a, terimakasih selalu memberikan motivasi untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. Terima kasih kepada adik-adik terhebat yang sangat penulis sayangi, M. Wira Ikhwana, Syafira Bunga Rahmadani, Wahyu Satria



Mahendra, dan Zakira Lutvia Fajri yang senantiasa memberikan penulis nasehat dan semangat serta selalu mendengarkan cerita penulis. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan adik-adik yang sangat penulis anggap dan penulis syukuri kehadirannya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus juga menjadi Dosen Pembimbing bagi penulis
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis
6. Seluruh dosen dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis mnyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Diskopar) Kota Dumai, Badan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, LSM Pencinta Alam Bahari, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.

8. Kepada Sahabat penulis yang sangat penulis sayangi Andriyani Marsanda, M. Fajri Alfattah, Nadya Anastasya Wiyanto, Vania Aprilia, Oktaviani, Muhammad Faiz, Feni Rahayu, Ratna Astriani, Isna Nurdayanti, Yola Nurkhalida dan Helvira Yulianda.
9. Teman-teman seperjuangan lokal D angkatan 19 Administrasi Negara yang telah kebersamai penulis dalam berjuang, memberikan motivasi, dan menjadi contoh yang baik bagi penulis
10. Study Club Dinamika Publik, HMPS-Administrasi Negara, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Forum Diskusi Ekonomi Islam UIN Suska Riau, ISC Al-Iqtishodi, FKII Asy-Syams, *Global Islamic Students*, dan *FEIS Debate Club* yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali ilmu lebih dalam serta menjadi wadah bagi penulis untuk mencari pengalaman
11. Kepada Keluarga besar serta sanak saudara yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Anggota KKN Buatan Baru yang telah memberikan sinar baru bagi penulis
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu dalam pengembangan ilmu baru kedepannya. Aamiin allahumma aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

NELVI RAHMADANI

NIM. 11970524745

DAFTAR ISI

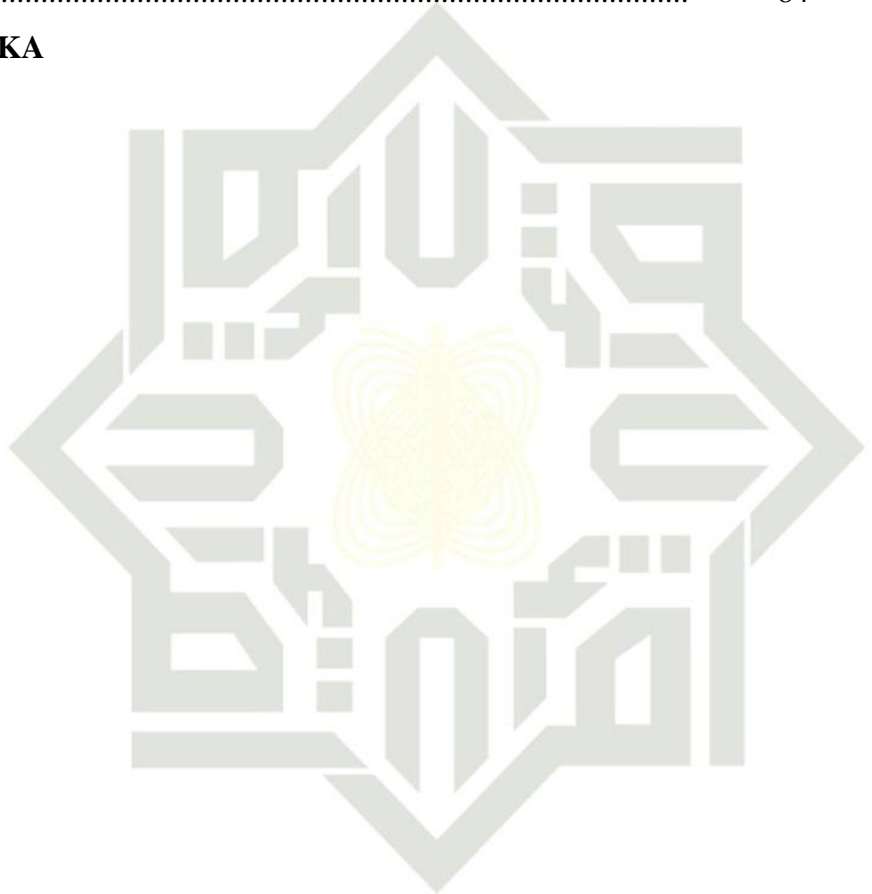
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 <i>Collaborative Governance</i>	14
2.2 Model <i>Collaborative Governance</i>	18
2.3 Faktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i>	34
2.4 Penanggulangan	39
2.5 Banjir	39
2.6 Pandangan Islam Terhadap Penanggulangan Bencana	42
2.7 Penelitian Terdahulu	44
2.8 Defenisi Konsep	51
2.9 Konsep Operasional	52
2.10 Kerangka Berpikir	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	54
3.3 Sumber Data	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data	55
3.5 Informan Penelitian	56
3.6 Teknik Analisis Data	57

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	59
4.1 Gambaran Umum Kota Dumai	59
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Dumai	59
4.1.2 Visi Misi Kota Dumai	61
4.1.3 Letak Geografis Kota Dumai	61
4.2 Gambaran Umum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	65
4.2.1 Sejarah Singkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	65
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi BBKSDA Riau	68
4.2.3 Taman Wisata Alam Sungai Dumai.....	71
4.2.4 Struktur Organisasi BBKSDA Riau	73
4.3 Gambaran Umum Dinas PUPR	74
4.3.1 Sejarah Dinas PUPR Kota Dumai	74
4.3.2 Visi dan Misi Dinas PUPR Kota Dumai	75
4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Kota Dumai	75
4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	77
4.4 Gambaran Umum Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	78
4.4.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	78
4.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	78
4.4.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	80
4.5 Gambaran Umum Diskopar Kota Dumai.....	81
4.5.1 Fungsi Dinas Kota Dumai 81	
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	82
5.1 Pelaksanaan Collaborative Governance Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai	82
5.1.1 Dinamika Kolaborasi.....	83

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2 Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi (Actions)	92
5.1.3 Dampak dan Hasil Tindakan	96
5.2 Faktor Penghambat <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai	98
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	84

DAFTAR PUSTAKA
SAMPARAN

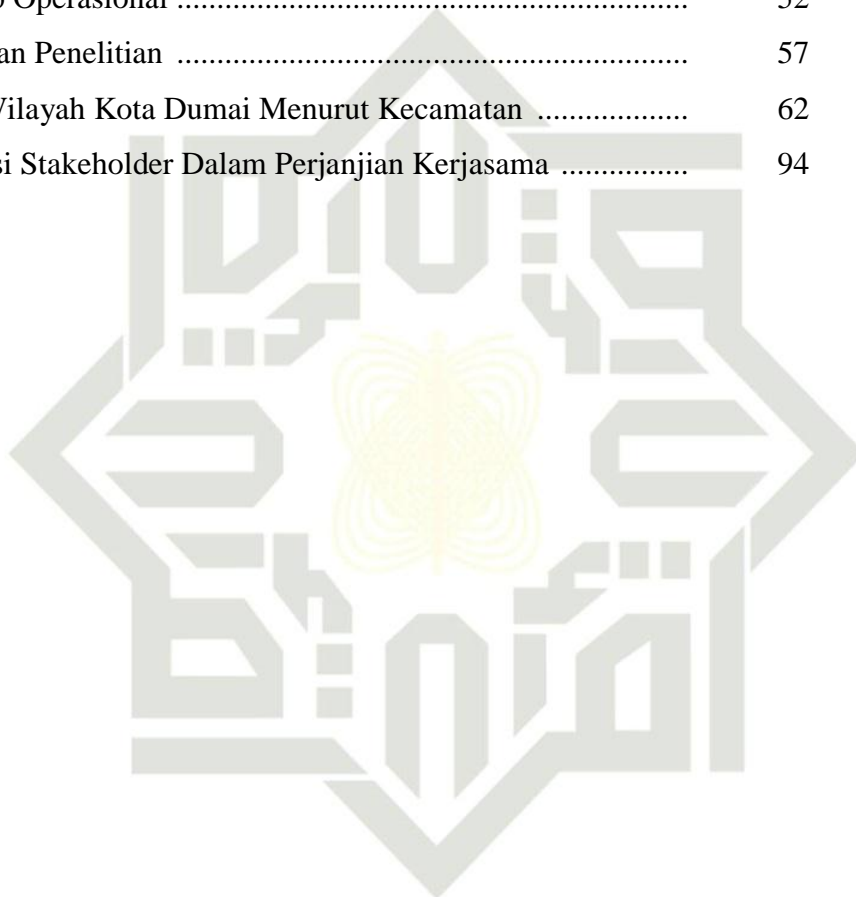


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

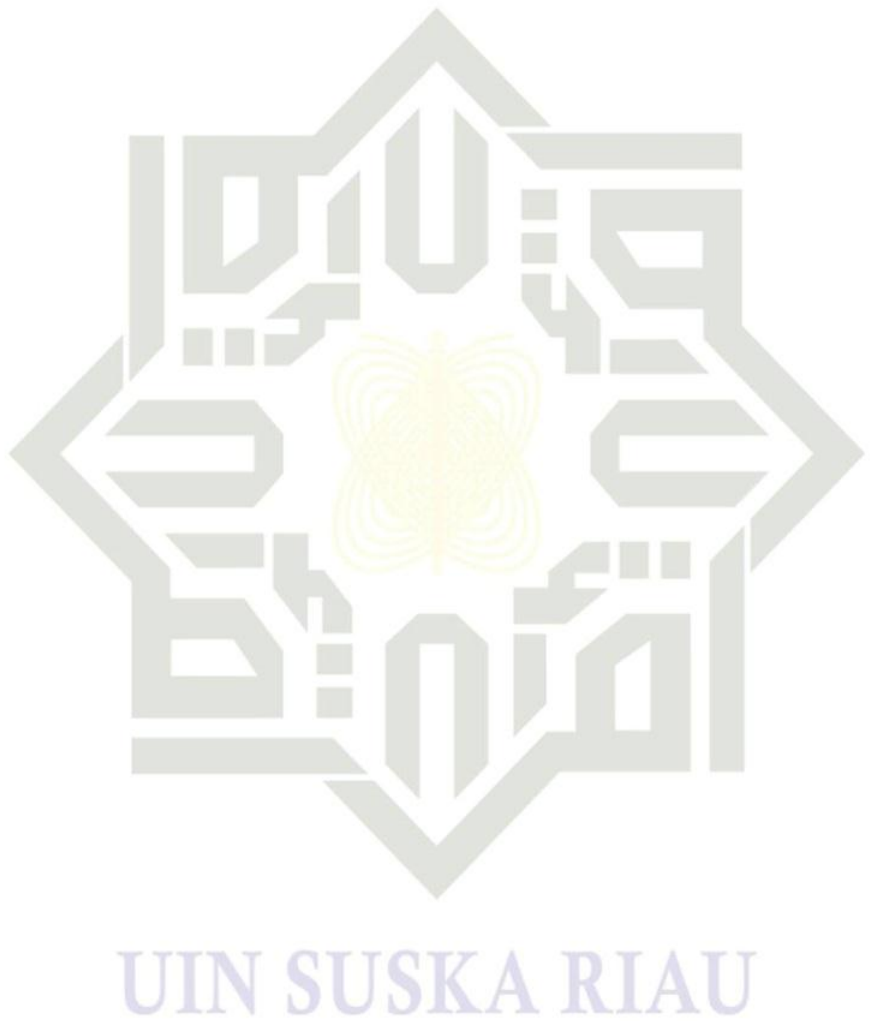
DAFTAR TABEL

Luas Genangan Banjir Kota Dumai	5
Jumlah Korban Yang Terkena Dampak Banjir	7
Dampak Kerusakan Fasilitas Akibat Banjir Tahun 2022	7
Penelitian Terdahulu	44
Konsep Operasional	52
Informan Penelitian	57
Luas Wilayah Kota Dumai Menurut Kecamatan	62
Tupoksi Stakeholder Dalam Perjanjian Kerjasama	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Banjir Di Kota Dumai	5
Gambar 2.1	Kerangka Kerja Model Collaborative Governance	21
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir	53



Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilindungi Undang-Undang tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan kondisi geologis wilayah dan keadaan iklim, Indonesia menjadi negara yang rawan terkena bencana (Wulandari & Salam, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana juga menjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menghimpun data terkait kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Kabupaten/kota diantaranya pada tahun 2020 Indonesia mengalami 4650 kejadian bencana. Disusul dengan kenaikan sebesar 16,2% di tahun selanjutnya yakni pada tahun 2021 sebanyak 5.402 peristiwa dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3.544 kejadian. Berdasarkan data tersebut disebutkan bahwa bencana hidrometeorologi atau banjir menjadi bencana yang cukup sering terjadi (Hardiyanto & Pulungan, 2019). Sepanjang 3 tahun terakhir kejadian banjir telah melanda daerah di Indonesia khususnya di perkotaan dengan total lebih dari 4.390 kasus (Skouloudis et al., 2023).



© Tak Sipta mik UN Suska Riau
 Stage Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal-Scripta Bilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai negara yang mengalami 2 (dua) musim yaitu musim panas dan musim penghujan maka banjir tidak menjadi sesuatu yang mengherankan lagi bagi masyarakat Indonesia (Hartono, 2016). Mengingat Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis beriklim tropis dengan kelembapan yang cukup tinggi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia maka bencana hidrololgi seperti banjir menjadi sesuatu yang akrab dirasakan oleh penduduknya. Dihimpun dari data BNPB menunjukkan bahwa 63,7 juta penduduk menempati kawasan yang sering terkena bencana banjir (Utomo & Minza, 2016). Rawannya kejadian banjir di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kondisi wilayah dimana hampir 30% dari 100 sungai di Indonesia mengalir di daerah yang ramai akan penduduk.

Banjir adalah salah satu bentuk daya rusak air yang merupakan fenomena alam karena tingginya curah hujan dan tidak cukupnya kapasitas badan air (sungai atau saluran drainase) untuk menampung dan mengalirkan air (Astuti & Sudarsono, 2018). Banjir biasanya dianggap sebagai kenaikan tinggi permukaan air yang melebihi keadaan normalnya atau dalam pengertian umum meluapnya air melewati batas kapasitas saluran yang normal (Zulaeha et al., 2022). Banjir juga diartikan sebagai kondisi dimana limpasan air mengalir di atas permukaan air yang melebihi tinggi muka biasanya yang menggenangi wilayah tepian yang lebih rendah limpasan air (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

Banjir timbul karena dipengaruhi oleh dua faktor (Pradika et al., 2018). Pertama banjir terjadi karena dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, atau pasang surut air laut (Pahleviannur, 2019). Kedua, banjir juga timbul karena faktor non alam seperti kelalaian manusia dalam menjaga



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan seperti penebangan pohon secara liar, sampah yang menumpuk, serta kondisi pemukiman yang begitu padat (Harahap, 2019), karena itu banyak saluran/darinase yang tidak lagi memadai (Maghfur, 2017). Kemudian diangganya pembuatan kebijakan yang baik dalam upaya pengentasan dan penanggulangan permasalahan banjir ditambah dengan meluasnya permukaan air yang tertutup oleh bangunan membuat banjir masih melanda berbagai kawasan yang ada di Indonesia (Utama et al., 2020).

Apabila banjir tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka bencana tersebut akan memunculkan banyak kerugian baik secara individu ataupun sosial (Rahayu et al., 2020). Dampak banjir yang dapat dirasakan secara langsung adalah terhambatnya aktivitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti terganggunya kegiatan perkantoran, dan kegiatan jual-beli masyarakat (Bima Ade Prayoga Setiawan et al., 2021). Banjir juga dapat menyebabkan beberapa benda penting seperti dokumen, barang berharga, perabotan rumah tangga menjadi rusak, hilang, dan hanyut sehingga menyebabkan kerugian materi ataupun non materi yang tak terhingga. Banjir yang terjadi di suatu wilayah juga memberikan dampak buruk bagi lingkungan (Philia et al 2023). Fenomena banjir juga bisa terjadi kapan saja dan sering kali mengakibatkan timbulnya penyakit bahkan kehilangan nyawa serta harta benda (Findayangi, 2015). Untuk itu setiap dampak negatif yang telah terjadi harus segera ditanggulangi agar tidak membuat kerusakan yang berkelanjutan kedepannya (Rahmat et al., 2021).

Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai penanggulangan banjir juga sudah tercantum dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Ketentuan dasar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tersebut dapat ditafsirkan bahwa “merupakan kewajiban Negara” untuk melindungi seluruh penduduk dan lingkungan hidup Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Semakin cepat penanganannya, semakin banyak efek negatif yang dapat dimitigasi dan semakin cepat pemulihan yang dapat dilaksanakan (Khairul Rahmat & Alawiyah, 2020).

Biasanya banjir sering terjadi di perkotaan mengingat banyaknya ragam aktivitas dan pembangunan yang ada di kota (Zulaeha et al., 2022). Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau mengklasifikasikan bahwa Dumai termasuk satu dari tiga kota yang cukup sering terkena banjir. Dumai masih menjadi kota yang sering terkena banjir karena letaknya yang berada di kawasan pesisir Timur Pulau Sumatera dan sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah yakni sekitar 3 meter di atas permukaan laut (Sihaloho, 2022).

Penyebab lain Kota Dumai masih sering dilanda banjir adalah karena pengaruh air pasang dari sungai-sungai yang ada di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Apabila air sungai tersebut meluap maka akan terjadi banjir rob (*remaining on board*) atau masyarakat dumai biasa menyebutnya dengan *pasang keling*. Kondisi tersebut akan semakin buruk apabila curah hujan tinggi.

Tabel 1.1 Luas Genangan Banjir Kota Dumai

KETERANGAN	LUAS GENANGAN
Remaining On Board (Pasang Keling)	415 ha
Hujan	436 ha
LUAS (HA)	851

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2023

Seiring dengan itu kapasitas sungai tidak memadai, pembuangan sampah dan sistem drainase untuk pengendalian banjir belum terkelola dengan baik ditambah penurunan tanah dimana sebagian lahan yang ada di Kota Dumai merupakan rawa gambut dengan kedalaman 0 sampai 0,5 meter menyebabkan banjir menjadi kejadian rutin yang sering dialami masyarakat Kota Dumai.

Gambar 1.1 Peta Banjir Di Kota Dumai



Sumber : Perkim.id



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan kegiatan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin dari penulis ini tanpa pencantuman dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biasanya genangan air menggenangi beberapa jalan yang ada pada Kecamatan tersebut. Peta Banjir tersebut menunjukkan beberapa titik yang rawan bencana banjir ada di Kecamatan Dumai Kota (Kelurahan Sukajadi, Rimba Delamping), Kecamatan Dumai Timur (Kelurahan Buluh Kasap), Kecamatan Dumai Barat (Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan), dan Dumai Selatan (Kelurahan Bumi Ayu, Bukit Datuk, Bukit Timah, dan Ratu Sima). Banjir biasanya terjadi secara rutin, terlebih lagi jika di penghujung tahun sering mengalami musim hujan maka banjir dapat terjadi 1-4 kali dalam seminggu dengan ketinggian banjir mencapai 0,3 m sampai dengan 2,5 meter.

Sebagai kota industri yang padat dengan kegiatan dan aktifitas, maka banjir sangat mempengaruhi aktifitas sosial-ekonomi masyarakat yang ada di Kota Dumai. Dalam jangka pendek banjir mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat, sulitnya memperoleh air bersih, muncul masalah kesehatan seperti penyakit diare, infeksi saluran pernafasan yang terkadang menelan korban jiwa (Rahmat et al., 2021).

Banjir di Kota Dumai dapat membuat barang-barang berharga, rumah, dan fasilitas umum dapat rusak akibat terkena genangan air. Banjir juga menghambat sektor perdagangan karena kurangnya kegiatan jual beli yang mempengaruhi omset penjualan serta pendapatan masyarakat. Di sisi lain banjir dapat mengganggu kesehatan yang terkadang menelan korban jiwa. Penyakit diare dan gatal gatal biasanya menyerang semua usia mulai dari balita, anak anak, remaja, dewasa bahkan lansia.



Tabel 1.2 Jumlah Korban Yang Terkena Dampak Banjir Tahun 2022

Titik Banjir	Jumlah Korban
Kelurahan Bukit Datuk	884 Jiwa
Kelurahan Bumi Ayu	2.332 Jiwa
Kelurahan Dumai Kota	718 Jiwa
Kelurahan Sukajadi	450 Jiwa
Total	4.384 Jiwa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, 2022

Tabel 1.3 Dampak Kerusakan Fasilitas Akibat Banjir Tahun 2022

No	Nama Kelurahan	Uraian Kerusakan			Total Nilai Kerusakan Akibat Banjir (Rp)
		Drainase (meter)	Jalan (meter)	Rumah (unit)	
1	Bukit Datuk	180 m	120 m	261	Rp 828.000.000,00
2	Bumi Ayu	300 m	282 m	336	Rp 3.223.000.000,00
3	Sukajadi	80 m	59 m	204	Rp 475.000.000,00
4	Dumai Kota	45 m	70 m	258	Rp 592.000.000,00
	Total	605 m	531 m	1.059	Rp 5.118.000.000,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, dapat diketahui bahwa lebih dari 4000 jiwa terkena dampak akibat banjir. Total kerugian mencapai 5 miliar rupiah akibat banyaknya fasilitas seperti rumah, jalan, drainase menjadi rusak akibat kejadian banjir tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stare Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penulis.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam jangka panjang banjir dapat menimbulkan perubahan lingkungan sebagai akibat terganggunya kondisi hidrologi, peningkatan aliran permukaan dan debit puncak banjir karena daya serap air pada permukaan tanah berkurang, dan juga bisa menyebabkan erosi bahkan longsor (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Dengan demikian jelas sudah bahwa banjir membawa dampak yang membawa kerugian di berbagai sektor seperti sektor lingkungan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Untuk itu penanggulangan bencana banjir harus dilaksanakan agar tidak lagi terus-menerus menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan alam.

Sejauh ini sebenarnya pemerintah telah berupaya dalam penanganan masalah banjir mengingat dengan identitas Kota Dumai yang dikenal sebagai kota minyak, kota singgah dan kota industri yang maju sehingga menyebabkan pesatnya aktivitas baik dari luar daerah maupun dari masyarakat Kota Dumai itu sendiri. Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Dumai juga telah membangun drainase pembus ke laut sepanjang 227 meter di atas lahan hibah masyarakat untuk mengatasi persoalan banjir di lingkungan warga. Akan tetapi program tersebut ada di Kelurahan Rimba sekampung yang artinya pembangunan belum merta sehingga banjir masih kerap terjadi di beberapa titik.

Sejak dilantiknya pemimpin baru pada Februari 2021, H. Faisal SKM, MARS dan seluruh staffnya berkhidmat untuk menjadikan dumai sebagai Kota Idaman (Investasi, Daya saing, Amanah, Mandiri, ber-Adab, dan Nyaman lingkungannya). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan nilai kenyamanan lingkungan adalah berkhidmat untuk menanggulangi banjir agar



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat Kota Dumai tidak lagi merasakan dampak bencana tahunan tersebut. Pemerintah Kota Dumai menganggap banjir adalah fenomena serius yang harus segera ditangani sehingga perlu adanya sinergitas disetiap pihak, dengan itu pula pemerintah kota dumai dalam hal ini sudah mengusulkan anggaran untuk penanggulangan banjir Kota Dumai.

Sebagai wujud keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam penanganan banjir yang kerap terjadi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) meluncurkan Aplikasi KHIDMAT Bergerak Penanggulangan Banjir (BERGULIR). Dengan menggunakan *smartphone* masyarakat dapat segera memberi informasi terkait banjir dan Pemko Dumai dapat memberikan penanganan banjir secara cepat, tepat sasaran, efektif dan efisien. Kemudian usaha yang telah dilakukan Pemko Dumai yaitu melakukan perbaikan drainase, normalisasi aliran sungai, serta melakukan perbaikan DAS. Disisi lain pihak swasta seperti Pertamina Kota Dumai, dan Pelindo Kota Dumai juga ikut membantu dalam melakukan normalisasi sungai, akan tetapi program tersebut tidak menjadi program rutin sehingga menyebabkan banjir masih sering terjadi.

Sementara itu untuk menyelamatkan warga maka adanya himbauan untuk tidak membangun rumah di kawasan pinggir sungai, melakukan sistem tebang pilih dan penghijauan kembali, membangun pemecah gelombang, pembuatan hutan Mangrove/Bakau akan tetapi jika program program tersebut tidak diikuti dengan kuatnya komitmen masyarakat untuk dijalankan maka persoalan banjir akan terus ada. Disisi lain, sebagian masyarakat Kota Dumai sudah memiliki



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hal-Cipta-Biindungi-Undang-Undang-
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesadaran untuk menanggulangi banjir akan tetapi upaya yang dilakukan hanya beberapa tempat saja sehingga penanggulangan banjir yang dapat diupayakan oleh masyarakat belum merata.

Dengan demikian sudah sepantasnya Pemerintah Kota Dumai senantiasa bersedia sekaligus memberdayakan sumber daya yang ada. Untuk itu terkait penanggulangan banjir di Kota Kota Dumai perlu merumuskan kembali konsep kerja sama antar pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Adanya tata kelola kerja sama atau *collaborative governance* penanggulangan banjir memungkinkan masing-masing *stakeholder* berperan aktif sesuai porsinya. Sehingga dengan itu, penulis tertarik untuk melihat dan meneliti bagaimana **“Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *collaborative governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di kota dumai?
2. Apa saja yang menjadi hambatan pada pelaksanaan *collaborative governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di kota dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pada pelaksanaan *collaborative governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di kota Dumai?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian secara keseluruhan seharusnya dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya baik bagi penulis maupun bagi orang lain. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada :

a. Penulis

Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk meningkatkan kemampuan Pemikiran intelektual dalam menuliskan teori-teori yang telah diperoleh peneliti dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial UIN Suska Riau.

b. Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui proses dan hambatan pada *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai.

c. Pustaka

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi yang akan melengkapi banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan memahami keseluruhan pembahasan dalam proposal penelitian ini, perlu dikemukakan sistematika yang menjadu



- kerangka dan pedoman penulisan proposal. Penulisan skripsi ini menggunakan
- dua sistematis penulisan sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN**
- Pada bab I ini, penulis menguraikan beberapa bagian diantaranya adalah :
- Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI**
- Pada bab II ini, penulis akan menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, tinjauan masalah dalam perspektif islam, konsep operasional, defenisi konsep, dan kerangka berpikir yang relevan dengan objek yang sedang penulis teliti.
- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**
- Pada bab III ini, penulis akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam membangun data. Agar sistematis, bab tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisa data.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
- Pada bab ini peneliti menguraikan tentang lokasi tempat penulis meneliti fenomena banjir di Kota Dumai, dan beberapa instansi yang turun membantu menannggulasi persolan banjir seperti Dinas Pekerjaan Umum
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Site: Isami University of Siliwangi Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Penataan Ruang Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, serta beberapa instansi lain yang mendukung.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang terdiri dari masalah penelitian yaitu pelaksanaan *collaborative governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Dumai serta hambatan pada pelaksanaan *collaborative governance* sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Dumai

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Collaborative Governance

Sebelum menjelaskan tentang *Collaborative governance*, terlebih dahulu perlu diketahui makna dari *Governance* karna kata tersebut menjadi dasar dari konsep *Collaborative governance*. Kata *governance* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti tata kelola pemerintahan (Sedarmayanti, 2009:273). Istilah tersebut mengacu pada “*the act, fact, manner of governing*” yang artinya tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah.. kemudian Mustopadidjaja (2003) mengungkapkan *governance* sebagai: 1) Penyelenggaraan pemerintahan, 2) Tata kelola pemerintahan, 3) Sistem pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara.

Konsep *governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik ini dihadirkan untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Retno Sunu Astuti, dkk dalam bukunya *Collaborative governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (2020:3) menyatakan bahwa : “*Governance* selaku tata kelola dapat disimpulkan sebagai transformasi pada “penyelenggaraan kebijakan publik” yang titik kuncinya tidak hanya pada pemerintahan, tetapi juga melibatkan aktor lain untuk ikut mengambil peran baik dari masyarakat, sktor swasta, dan lainnya”.

Adanya transisisi pada pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan good *governance* pada sektor publik dengan melakukan kerja sama pada 3 aspek yang dianggap turut mengambil kepentingan di berbagai sektor seperti gejolak politik,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kegiatan perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam, keuangan negara yang implementasikan dengan menerapkan prinsip yang dianut seperti asas keadilan dan kesamarataan, efisien, transparansi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (World Conference on Governance, UNDP). Berdasarkan pendapat dari para ahli maupun forum mengenai definisi dan karakteristik *Governance* maka dapat ditarik suatu adalah tata kelola pemerintahan yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk melakukan kerjasama agar mendapatkan hasil yang baik.

Kemudian istilah tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan sebuah konsep terbaru yang sudah banyak dipakai pada proses penyelenggaraan kebijakan publik. Mengacu pada nilai dari *collaborative* (kolaborasi) berbeda dengan nilai pada *network* (jaringan) dan *partnership* (kemitraan). Secara prinsip, ada nilai dasar yang melekat pada *collaborative governance* (Dewi, 2019) *Collaborative governance* mengacu kepada tata kelola pemerintah dimana melibatkan partisipasi langsung dari pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, menuju pertimbangan dan kemufakatan dalam menetik kesepakatan bersama, untuk mengembangkan atau menerapkan kebijakan dan program publik (Ansell dan Gash, 2008). Kolaborasi tersebut muncul sebagai respons terhadap kegagalan implementasi, biaya tinggi, dan politisasi regulasi sektor publik (Ansell dan Gash, 2007).

Sunarharum (2016) mengungkapkan bahwa *collaborative governance* bisa mengatasi banyak sekali kendala di masyarakat, seperti:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perbedaan kesadaran antara pemerintah serta masyarakat perihal pengelolaan banjir.

b. Terbatasnya tingkat teknis serta pengetahuan rakyat yang terkena akibat, dan

c. Terbatasnya kapasitas pemerintah pemerintah dalam menyebarkan kebijakan mitigasi yang tepat sasaran.

Collaborative governance timbul karna adanya tuntutan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar forum sebab ketidakmampuan meweujudkan tujuan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Tidak hanya itu, tata kelola kolaboratif hadir karena keterbatasan dana yang tadinya hanya berasal satu forum, dengan menerapkan *collaborative governance* dimana actor-aktornya saling bekerja sama sehingga dana untuk kegiatan tidak hanya bersumber dari satu forum, akan tetapi juga mendapat bantuan dari pihakn yang ikut serta pada kolaborasi yang dalam hal ini mengikutsertakan sektor swasta serta masyarakat.

Pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat Balogh dkk (Subarsono, 2011). Hal ini dikarekan suatu masalah terkadang menjadi masalah publik dimana yang merasakannya tidak hanya individu ataupun kelompok tertentu tapi juga dirasakan oleh bagian lainnya. Sangat memungkikan problematic yang dihadapi oleh bagian tertentu membawa pengaruh pada kelompok yang lain. Hal tersebut terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga kelompok-kelompok tadi menghadapi tekanan yang sama dan bermuara pada munculnya kekuatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama pula. Mengatur dan mengelola suatu persoalan publik, seringkali dirasa tidak optimal apabila hanya



© Hakipta milik UIN Suska Riau
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditangani oleh satu pihak saja, perlu adanya dorongan dari unit-unit non-pemerintahan lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat LSM untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi serta upaya yang telah programkan setiap pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pada proses ataupun metode untuk mengatur, merekonstruksi dan menata setiap isu dihadapi dan diselesaikan secara bersama sama dengan mengikutsertakan berbagai pihak yang berbeda pada setiap kalangan yang memiliki keluhan yang sama maka dengan itulah rumusan *collaborative governance* antar organisasi, masuklah disana organisasi pemerintah dan civil society, yang memiliki andil untuk dirembukkan dalam pengelolaan, analisis, serta resiko yang akan dihadapi bersama dan diharapkan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi atau setidaknya dikurangi secara signifikan.

Collaborative governance dapat muncul karena melihat kesamaan kekhawatiran yang dihadapi tiap institusi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan kerjasama. Sebab tiap-tiap kelompok pastinya punya sebab-sebab yang menyebabkan kelompok tersebut memiliki batas dalam menjalankan kemauannya.

Selanjutnya *collaborative governance* tersebut dapat melalui 6 proses, Vigoda

(2002) menyebutkan tahapannya adalah :

1. Memfokuskan isu yang dihadapi
2. Menentukan karakteristik terhadap penyelesaian masalah
3. Mencari tau actor yang terlibat beserta peran yang dapat diambil
4. Mencari tau bagaimana peluang dan tantangan yang akan dihadapi
5. Melakukan implementasi dari rumusan-rumusan yang telah disepakati



6. Serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* mempunyai beberapa peluang yang bisa menyumbang keuntungan untuk setiap pihak yang terlibat. Kolaborasi menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah public yang bersifat kompleks, solusi bagi kegagalan implementasi kebijakan, efisiensi anggaran, mampu memobilisasi kepentingan politik tiap aktor dan meredam adanya konflik antar lembaga yang memiliki peran penting didalamnya.

2.2 Model Collaborative Governance

Basis teori dari collaborative governance berangkat dari banyak kajian keilmuan, diantaranya teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan dan studi manajemen lingkungan, teori jaringan, teori manajemen konflik, dan teori komunikasi. Basis teori ini mempengaruhi sudut pandang dan penekanan collaborative governance dalam merumuskan komponen utama pembentuknya. Kata model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (KBBI online, 2020). Sedangkan pengertian lainnya adalah representasi suatu realitas, dengan kata lain model adalah jembatan antara dunia nyata dengan dunia berpikir untuk memecahkan suatu masalah (Fauzi dan Anna, 2005).

Model dapat dimaknai sebagai sebuah gambaran realitas yang disederhanakan (Ferdinand, 2006). Model adalah representasi realitas yang disajikan dengan suatu derajat struktur dan urutan (Seels dan Richey, 1994).



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model dapat disimpulkan sebagai gambaran realitas yang disederhanakan kemudian disajikan dalam derajat dan struktur yang dapat dipergunakan sebagai aplikasi teori ke dalam dunia nyata. Berikut ini beberapa model prinsip *collaborative governance* yang banyak dijadikan referensi utama dalam banyak kajian ilmiah:

1. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011)

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan (lembaga publik), institusi swasta maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Adanya interdependensi antaraktor maupun antarorganisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi tersebut, baik secara tingkatan merata maupun dilihat dari bagan keatas, maka akan semakin besar kebutuhan untuk melakukan kolaborasi. *Collaborative governance* menjadi cara yang diharapkan memberikan sifat mudah namun kompleks antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengambil kesepakatan yang sama sehingga dapat menghasilkan titik temu yang paling efektif.

Ada sekian banyak model *collaborative governance* sebagai suatu metode kerja untuk menganalisa terjadinya kolaborasi antar-stakeholders. Salah satunya adalah model *Collaborative governance Regime (CGR)* yang digagas oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2011). Model CGR dinilai secara



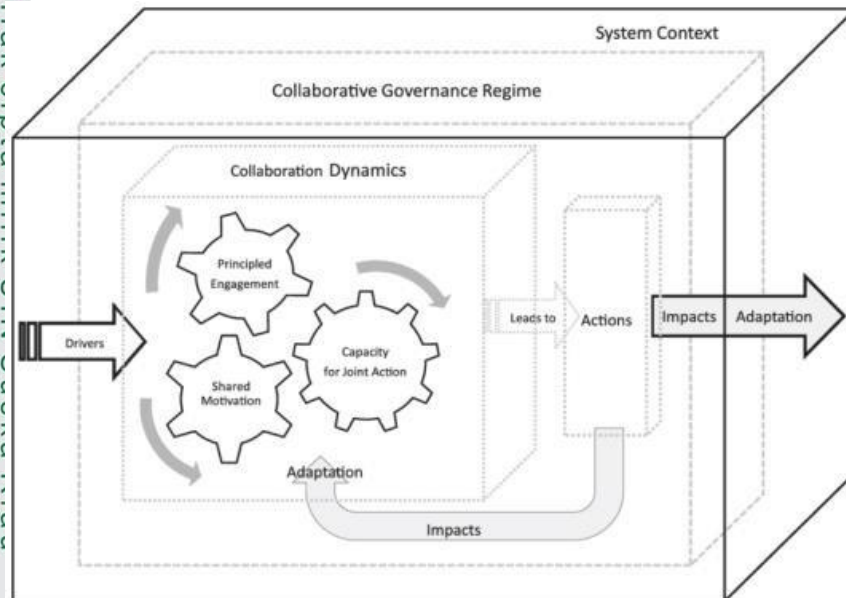
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin seluruh karya tulis ini dan memperbanyak atau menyebarkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sangat sederhana namun detail dan mendalam untuk melihat proses kolaborasi input, driver hingga dampaknya. Kerangka kerja CGR mengintegrasikan banyak komponen tata kelola kolaboratif, mulai dari system context dan drivers melalui collaboration dynamic sampai dengan tindakan, dampak, dan adaptasi. Model CGR memandang bahwa proses kolaborasi di antara para aktor yang terlibat (stakeholder), baik aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, haruslah mengacu pada kerja sama yang berkelanjutan.

Melalui model CGR dapat diketahui ketercapaian dari terwujudnya good governance yang menurut Nag (2018) mempunyai delapan karakteristik, yaitu adanya partisipasi, adanya aturan hukum, adanya ekuitas (kesetaraan) dan inklusivitas, transparan, responsif, adanya konsensus dan legitimasi, efektif dan efisien, serta akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh merumuskan bahwasanya proses kolaborasi terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi (Emerson et al., 2012)

Gambar 2.1 Kerangka Kerja Model Collaborative Governance



Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), “An Integrative Framework for Collaborative governance”

Dinamika Kolaborasi

Setiap kegiatan kolaborasi, dinamika kolaborasi merupakan unsur inti. Penegasan kualitas kolaborasi terdapat pada dinamika untuk menggerakkan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kemampuan untuk mewujudkan aksi.

a. Pergerakan Prinsip Bersama

Beberapa aspek penunjang diantaranya dialog tatap-muka, atau dengan memanfaatkan teknologi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan prinsip bersama. Dari sana dapat dipertegas ulang pencapaian bersama pembentukan dan pengembangan nilai-nilai bersama yang biasanya disampaikan dari beberapa sudut pandang para aktor. Sehingga atas dasar tersebut dapat disatukan prinsip yang sama dan merupakan inti dari hal ini. Dalam mendorong pelaksanaan nilai bersama, ada beberapa komponen diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Pengungkapan

Proses mengungkap kepentingan, prinsip-prinsip aktor, serta upaya merumuskan hal yang krusial bersama. Penjelasan tersebut dianalisa atas dasar analisis actor tersebut mau ikut serta dalam kegiatan kolaborasi

1.1. Deliberasi

Deliberasi pada kolaborasi telah terwujud melalui diskusi bersama. Yang berarti terdapat motivasi untuk menguraikan ide, dan dianalisa ketika mereka menampilkan masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan.

1.2. Determinasi

Determinasi adalah tahapan kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk menetapkan tujuan secara keseluruhan.

1.3. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan alur dan terdapat beberapa elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, validasi internal, dan tanggungjawab`. Di dalam motivasi bersama, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1. Kepercayaan Bersama

Diperlukan upa yang berketerusan dari hasil dialog untuk mengetahui (discover) satu sama lain, dan membuktikan layak tidaknya untuk dipercaya.

Selain itu, terdapat beberapa hal lain juga memberikan pengaruh.

2. Pemahaman Bersama

Maksudnya adalah setiap aktor saling mengerti dan menghargai ketidaksamaan yang ada.

3. Legitimasi Internal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legitimasi Internal merupakan bukti yang dinyatakan oleh internal kolaborasi di dalamnya aktor-aktor tersebut dapat dipercaya atau kredibel untuk menjalankan kewajiban dan fungsinya.

Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Bertujuan untuk menjalankan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang cukup besar dari setiap stakeholder.

Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Meliputi prosedur umum kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat dilaksanakan apabila telah disepakati secara bersama-sama baik itu informal maupun formal

Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi)

Mempunyai peran inti dalam proses kolaborasi. Diantara fungsinya adalah 1

- 1) Sebagai pihak yang memberikan motivasi untuk kolaborasi
- 2) Menginisiasi dialog tatap-muka
- 3) Memfasilitasi serta memediasi
- 4) Gambaran dari berbagai aktor yang berkontribusi
- 5) Penyalur informasi
- 6) Menyarankan untuk memanfaatkan teknologi dalam kolaborasi, serta
- 7) Melakukan advokasi dikalangan umum

3. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh stakeholders sehingga dapat memberikan manfaat untuk actor yang terlibat. Pengetahuan yang tidak disalurkan dan dikembangkan akan dapat memunculkan kebingungan aktor



UIN SUSKA RIAU

kolaborasi akibat ketidakjelasan suatu informasi yang telah diperoleh. Dalam kegiatan kolaborasi, informasi biasanya diberikan ketika proses diskusi berlangsung.

Sumber Daya

Biasanya sumber daya dapat berupa :

1. Anggaran
2. Distribusi tupoksi
3. Motivasi proses teknis dan administrasi kegiatan
4. Saling menjalin kerjasama
5. Penguatan daya analisis kolaborasi, dan
6. Implementasi yang telah dilakukan
7. Komitmen setiap personal

Tindakan Kolaborasi

Bentuk-bentuk tindakan pada proses kolaborasi dalam aksinya begitu bervariasi dimana hal tersebut menjadi bentuk dan cerminan terhadap dinamika kolaborasi. Bagaimanapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan atau diskusi dan sebagainya serta kualitas yang dimiliki bisa ditinjau dari pembantuan dan pemahaman yang konkret akan dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi. Kemudian, arah dari kegiatan tersebut memberikan pengaruh sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dampak dan Adaptasi

Dalam sub ini dampak yang dimaksudkan adalah dampak secara jangka pendek maupun jangka panjang dan bagaimana melihat hasil yang mampu beradaptasi selama periode tertentu.

2. Vigoda (2002)

Memahami proses kolaborasi dapat dilihat melalui enam tahapan yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum kolaborasi yang akan dilakukan (Vigoda-Gadot, 2002). Tahapan tersebut antara lain:

1) Memutuskan isu

Memutuskan isu di dalam kolaborasi dilakukan untuk membuktikan kolaborasi tersebut baik atau buruk bagi anggotanya. Membuktikannya melalui dua kondisi, jika:

- a. Masalah diusahakan menjadi sebuah investasi bersama dengan membuat sebuah kelompok kerja bersama; dan
- b. Terdapat alasan yang tepat serta jelas agar dapat dipercaya. Pemangku kepentingan yang akan hadir akan memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar dalam kelompok.

2) Menentukan karakteristik masalah

Menentukan karakteristik masalah dapat dimulai dengan sebuah pertanyaan “apa dan dimana” masalah tersebut. Kolaborasi membutuhkan kejelasan apa yang menjadi isu dan dimana dibutuhkan tindakan. Setiap anggota adalah individu yang memiliki kompetensi untuk bernegosiasi terhadap masalah dan mampu saling bertukar gagasan untuk bekerja sama demi menghasilkan



kolaborasi yang efektif dan efisien.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mencari tau siapa saja yang terlibat

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi memiliki tujuan yang sama untuk saling meningkatkan komitmen, kepercayaan, dan keyakinan dalam perencanaan tujuan bersama. Dengan demikian proses menjalankan kolaborasi akan menjadi efektif dan efisien.

4) Mencari tahu bagaimana mengimplementasikannya

Terwujudnya kolaborasi yang efektif dapat dipengaruhi oleh kedewasaan berkomunikasi, kerja sama, ketulusan, keikhlasan dan fleksibilitas. Perlu dipahami pula bahwa kolaborasi adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

5) Mencari tahu bagaimana menyelenggarakannya

Untuk menyelenggarakan program atau kegiatan dengan baik, setidaknya terdapat hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

- Para pemangku kepentingan sepakat secara bersamasama melakukan program tersebut dengan metode yang sudah ditentukan bersama;
- Memikirkan kembali dan mendefinisikan tujuan; dan
- Menentukan indikator-indikator kerja untuk seluruh proses dalam berkolaborasi.

6) Mencari tahu bagaimana mengevaluasi prosesnya

Melalui evaluasi akan terlihat dampak dari upaya yang telah dilakukan dari proses kolaborasi, seperti:

- Menilai dampak dan perubahan bagi organisasi tersebut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi anggota organisasi; dan
- c. Bagi masyarakat yang mereka layani.

3. Weber, Lovrich, dan Gaffney (2005)

Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney mengemukakan kolaborasi dapat berhasil bila menekankan pada integrasi pada fungsi. Integrasi ini meliputi fungsi birokrasi, lintas arena kebijakan, level pemerintahan, dan warga ikut terlibat. Masyarakat dan organisasi non pemerintah terlibat dalam pemecahan masalah dan implementasinya (Weber et al., 2005).

Ada 3 (tiga) yang diungkapkan yakni: (1) dimensi vertikal; (2) dimensi horizontal; dan (3) dimensi hubungan kemitraan. Dimensi vertikal menggambarkan relasi antara lembaga pemerintah dengan lembaga lainnya, warga negara dan non pemerintah dalam hubungan atas bawah. Dimensi horizontal menggambarkan hubungan antar organisasi yang setara. Sedangkan dimensi hubungan kemitraan digambarkan sebagai perpaduan antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal sehingga menghasilkan suatu pengaturan yang efektif.

4. Ansell dan Gash (2008)

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model collaborative governace berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama (lihat gambar 3.4), yakni: terdiri dari: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008).

- 1) Kondisi awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama atau telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpatisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemagku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul pada komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4) Proses kolaboratif

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai dari mana. Dari kelima proses kolaboratif dapat dimulai dari mana saja.

a. Dialog tatap muka

Semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan parasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling



menguntungkan.

d. **Pemahaman bersama**

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

e. **Hasil antara (pertengahan)**

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

5. Ratner (2012)

Pendapat yang berbeda juga dikemukakan oleh Ratner (2012) bahwa di dalam Collaborative governance terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi (Ratner, 2012) yang meliputi:

1) **Identifikasi Hambatan dan Peluang (Identifying Obstacles and Opportunities)**

Fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pada tahap ini setiap pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai



© Paksipta miilk UN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan, dan pemangku kepentingan lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi.

Setiap pemangku keentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan.

2) Strategi Debat untuk Mempengaruhi (Debating Strategies for Influence)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

3) Merencanakan Tindakan Kolaborasi (Planning Collaborative Actions)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.

6. Schottle, Haghsheno dan Gehbauer (2014)

Schottle, Haghsheno dan Gehbauer membandingkan faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sifatnya otonomi, kerja sama, dan kolaborasi. Kesimpulan akhir dijelaskan bahwa faktor kuat yang paling mempengaruhi collaborative terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan bersama dalam mengambil risiko, sedangkan faktor yang lemah yakni munculnya potensi konflik, koordinasi, kontrol, bermitra, dan independent. (Schöttle et al., 2014).

1) Kesediaan Berkompromi

Dua pihak atau lebih, di mana masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda akan selalu menimbulkan konflik. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana masing-masing pihak meminimalkan konflik harus bersedia atau bisa berkompromi. Inti dari kolaborasi adalah manajemen konflik, yang berfokus pada menemukan kompromi yang akan membuat semua pihak merasa seolah-olah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan jika itu bukan apa yang



mereka pikir mereka inginkan.

2) Komunikasi

Kolaborasi yang efektif tidak dapat terjadi tanpa dukungan komunikasi yang baik, dan kolaborasi yang sukses lebih dari sekadar membagi tugas tetapi lebih tentang menumbuhkan tekad tulus untuk mencapai tujuan bersama.

3) Komitmen

Unsur utama kesuksesan kolaboratif adalah komitmen. Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi, tetapi jika dilakukan dengan benar, kolaborasi juga bisa menghasilkan komitmen bersama. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan naik-turun dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.

4) Saling Percaya

Saling percaya atau kepercayaan harus jelas dalam hubungan yakni bagaimana pekerjaan dilakukan, bagaimana kata-kata diucapkan, dan bagaimana hasilnya diperhitungkan. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan berantakan dengan cepat dan, kadang-kadang, tidak dapat diperbaiki.

5) Transparansi/ Pertukaran Informasi

Transparansi/ pertukaran informasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam kolaborasi, akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

6) Berbagi Pengetahuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Himpunan
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran materi yang dikutip ke publik.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagi pengetahuan dalam sebuah kolaborasi dapat membantu meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada para pemangku kepentingan. Kolaborasi akan mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

7) Kesiapan Mengambil Resiko

Dalam berkolaborasi, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan.

3.3 Faktor Penghambat Collaborative Governance

Dalam collaborative governance adanya kriteria yang dinilai dapat menghambat proses kolaborasi. Hal ini penting untuk dipahami secara jelas dalam menilai apakah praktik collaborative governance mengalami itu berhasil atau gagal dalam proses implementasinya. Dalam implementasi kolaborasi terdapat beberapa faktor penghambat yang ikut mempengaruhi berjalan tidaknya kolaborasi. Menurut Government of Canada terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik (Government of Canada, 2008). Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Faktor Budaya

Kolaborasi bisa gagal karena adanya alasan kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan risiko. Terciptanya kolaborasi yang efektif mensyaratkan para pelayan publik dan pemimpinnya untuk memiliki keterampilan dan kesiapan untuk masuk ke



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemitraan secara pragmatik yang berorientasi pada hasil. Memang memungkinkan mengabaikan konvensi dan menjadikan segala sesuatu dilakukan dalam sebuah kolaborasi, tetapi melakukan seperti ini dalam pelayanan publik yang tergantung prosedur dan tidak bersedia mengambil risiko tidak mungkin akan menjadikan kolaborasi sebuah kenyataan.

Ketergantungan pada prosedur secara berlebihan justru akan menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil risiko merupakan salah satu hambatan bagi terselenggaranya efektivitas kolaborasi. Kolaborasi gagal karena masih dipertahankannya konsep topdown oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerja sama dan egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborasi.

Kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau kelompok kepentingan lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan atau pihak pemerintah melalui pendekatan top-down. Kolaborasi juga bisa gagal karena kooptasi strategi pecah belah dengan cara mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang pro kebijakan pemerintah dan mengabaikan kelompok yang anti kebijakan pemerintah.

2. Faktor Institusi

Kolaborasi bisa karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Stage Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi (terutama dari pemerintah) cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi tersebut. Institusi-institusi yang masih terlalu berat mengadopsi struktur vertikal, akuntabilitas instansi dan arah kebijakannya bersifat vertikal dan tidak cocok untuk kolaborasi karena kolaborasi mensyaratkan caracara kerja atau pengorganisasian secara horizontal antara pemerintah dan non pemerintah.

Bahkan betapapun sebuah pemerintahan mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi yang biasanya bersifat demokrasi representatif (representative democracy) belum tentu cocok bagi kolaborasi karena demokrasi mensyaratkan tingkat proses dan derajat formalisme yang begitu besar dibanding dengan kemitraan horizontal. Kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas yang kadangkala tidak memerlukan aturan ketat secara formal terkadang juga tidak perlu mengikuti proses tradisional yang biasa dilakukan dalam keseharian atau sesuai standard operating procedure (SOP) yang biasa terjadi dalam organisasi publik yang mekanistik, tidak bisa menggantikan tujuan-tujuan yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan negara demokratis pada umumnya.

Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi milik pemerintah) cenderung kaku yakni hanya mengacu pada akuntabilitas pada organisasi atau atasan, atau aturan yang berlaku saja, sehingga akuntabilitas dalam konteks ini lebih menekankan pada responsibilitas.

3. Faktor Politik

Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif (forward-looking) adalah pemimpin yang bisa memperkenalkan berbagai macam nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif dan memberikan inspirasi terhadap agenda yang ditentukan dan bisa mengarahkan pada pencapaian hasil-hasil positif. Kolaborasi saja terhambat jika para pemimpin dari kelompok-kelompok yang berkolaborasi kurang atau tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik satu sama lain. Melalui kolaborasi ini konflik tujuan yang sering terpresentasikan sebagai tujuan masing-masing kelompok kepentingan dapat diminimalisir.

Hal lainnya yang menyebabkan gagalnya kolaborasi adalah perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi bisa gagal adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui di awal kesepakatan kerja sama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda di antara pemangku kepentingan termasuk para pemimpin masing-masing kelompok.

Selanjutnya, menurut Mattessich dan Monsey, faktor keberhasilan sebuah kolaborasi dapat dilihat dari 19 faktor yang diklasifikasikan ke dalam enam kelompok yakni (1) lingkungan, (2) keanggotaan, (3) proses/ struktur, (4) komunikasi, (5) tujuan, dan (6) sumber daya (Mattessich dan Monsey, 1992).

1. Lingkungan (Environment)
 - a. Sejarah Adanya Kolaborasi (History of Collaboration Exist)
 - b. Pemimpin Kolaboratif (Collaborative leader)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Iklim Politik/ Sosial (Political/ Social Climate)
2. Keanggotaan (Membership)
 - a. Saling Menghormati, Memahami, dan Kepercayaan (Mutual Respect, Understanding, and Trust)
 - b. Hanya Anggota yang Sesuai (Appropriate Cross-Section of Members)
 - c. Kepentingan Pribadi (Self-Interest)
 - d. Kemampuan Berkompromi (Ability to Compromise)
3. Proses/ Struktur (Process/ Structure)
 - a. Kepemilikan bersama (Member Share Stake)
 - b. Pengambilan Keputusan pada Berbagai Tingkatan (Multiple Layers of Decision-Making)
 - c. Fleksibilitas (Flexibility)
 - d. Pengembangan Aturan yang Jelas dan Pedoman Kebijakan (Development of Clear Roles and Policy Guidelines)
 - e. Kemampuan Beradaptasi (Adaptability)
4. Komunikasi (Communication)
 - a. Terbuka dan Frekuensi Komunikasi (Open and Frequent)
 - b. Membangun Tautan Komunikasi Formal dan Informal (Establish Formal and Informal Communication Link)
5. Tujuan (Purpose)
 - a. Tujuan dan Sasaran yang Nyata dan Dapat Dicapai (Concrete, Attainable Goals and Objectives)
 - b. Visi Bersama (Shared Vision)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tujuan yang Unik (Unique Purpose)
6. Sumber Daya (Resource)
 - a. Dana yang Cukup (Sufficient Funds)
 - b. Tenaga Terampil Disatukan (Skilled Converter)

4. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU No. 24/ 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan satu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan kerjasama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerjasama, disini dapat secara langsung menangani secara bersama-sama untuk suatu proyek tertentu. Namun juga dapat dilakukan secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk fenomena ataupun bencana yang terjadi di suatu daerah.

2.5 Banjir

Banjir adalah salah satu dari fenomena yang dapat mengganggu aktivitas manusia karena adanya air yang menggenang baik dari skala kecil maupun debit yang tinggi. Banjir biasanya didefinisikan sebagai aliran atau genangan air



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kerugian jiwa. Secara teknis, banjir adalah aliran sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampungan sungai, dengan demikian aliran sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah sekitarnya (Asdak dalam Dewi, 2010: 5).

Marfai dalam Kusumawara Dany (2017: 20) mendefinisikan bahwa banjir adalah peristiwa terjadinya air yang mengenai daratan dan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada daratan tersebut serta dapat membuat kerugian sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar yang terkena banjir. Banjir adalah debit aliran sungai yang relatif lebih besar dari biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga air limpasan tidak dapat ditampung oleh alur/palung sungai yang ada dan kemudian air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Hermawan et al., 2019)

Berdasarkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) banjir merupakan siklus yang cukup tinggi dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. Banjir yang pada hakikatnya menjadi proses yang terjadi secara alami maka akan memicu bencana bagi manusia apabila kegiatan tersebut terjadi secara berketerusan sehingga memunculkan banyak sekali kerugian jiwa maupun materi. Disisi lain banjir juga terjadi karena hasil produksi sampah dari beragam aktivitas manusia yang apabila hujan turun ataupun air sungai meluap dan sampah tadi menyumbat saluran air dan mengotori lingkungan.

Menurut KBBI, banjir merupakan fenomena terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Definisi kedua dari kamus tersebut banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap. Banjir



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.

Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain” (Ligal, 2008). Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh perlakuan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Pada diagram mekanisme terjadinya banjir dan bencana, terlihat bahwa faktor alamiah yang utama adalah curah hujan. Faktor alami lainnya adalah erosi dan sedimentasi kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pangaruh air pasang, perubahan kondisi daerah pengaliran sungai (DPS), dll. Sedangkan faktor non alamiah penyebab banjir adalah adanya pembangunan kompleks perumahan atau pembukaan suatu kawasan untuk lahan usaha yang bertujuan baik sekalipun, tanpa didasari dengan pengaturan yang benar akan menimbulkan aliran permukaan yang besar atau erosi yang menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Akibatnya, debit pengaliran sungai yang terjadi akan lebih besar dari pada kapasitas pengaliran air sungai sehingga terjadilah banjir.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fenomena banjir selalu dikaitkan dengan sungai. Banjir terjadi apabila debit air yang mengalir melalui bagian penampang sungai tidak tersalurkan dan terhampar sampai lembah aliran sungai. Tidak tersalurkannya air sungai dengan debit air disebabkan oleh badan sungai yang semakin sempit karena didesak pemukiman warga. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang. Pada umumnya, banjir terjadi pada musim hujan. Banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat tergantung pada waktu hujan, lama hujan, dan banyaknya curah hujan. Sistem DAS dapat memiliki luasan sempit ataupun luasan yang besar. Pada permulaan musim hujan, jarang terjadi banjir sebab air hujan yang turun baru mampu membasahi lapisan tanah permukaan. Akibatnya, air hujan yang menjadi aliran permukaan masih sedikit. Apabila lapisan tanah sudah mulai penuh air, jumlah aliran permukaan bertambah banyak, dan apabila aliran permukaan ini tidak ada yang menghambat, hampir semuanya mengalir ke sungai. Hambatan aliran air di permukaan dapat berupa serasah hutan dan tanaman hutan.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Penanggulangan Bencana

Dalam islam dahulu bencana terjadi sebagai bentuk peringatan terhadap kaum-kaum yang mengingkari Allah Subhanahuwata'ala dan Rasul-Nya. Bencana yang terjadi suatu daerah juga berupa bentuk ujian, dan siksaan terhadap kaum yang terus-menerus melanggar perintah Allah SWT dan Rasullullah SAW. Selain itu bencana juga terjadi akibat perilaku manusia yang destruktif dan eksploitatif terhadap lingkungan alam. Sebagaimana firman Allah yang tertera pada Qur'an surat Ar-Rum (30) : 41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam Al-Qur’an surat Asy-Syura (42) : 30 juga disebutkan bahwa :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا
عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).

Ayat tersebut menarangkan bahwasanya Allah SWT menegaskan kepada manusia kalau fenomena yang terjadi di darat maupun di laut merupakan sebab-akibat dari ulah manusia sendiri. Perihal tersebut membuktikan kalau bencana tidak semata-mata bentuk ujian dari Allah SWT. Terdapat banyak fakta yang membuktikan jikalau bencana tersebut terjadi ulah dari manusia yang tanpa sadar terus merusak lingkungan. Seperti ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, penebangan liar, pembangunan yang tidak memperhatikan aliran air, sehingga menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir.

Kemudian bencana Alam juga bentuk teguran dari Allah SWT terhadap kaum yang membangkang. Salah satu bentuk bencana yang diberikan adalah banjir. Di dalam al-Qur’an, banjir sempat menimbulkan korban jiwa dari kalangan kaumnya Nabi Nuh.

Sate Slamet University of Sultan Syarif Kasim Riau

Allah berfirman dalam Qur'an surat Al-Ankabut (29): 14

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ
عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

Artinya : Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Melihat beberapa kawasan yang rentan mengalami bencana serta melihat banyaknya kerugian akibat bencana yang terjadi di Indonesia maka diperlukan penanggulangan terhadap bencana secara terpadu serta terarah. Dalam perspektif agama, upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dari sesi penangkalan kesiapsiagaan, mitigasi, paham darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi juga merupakan bagian dari ajaran agama. Perlunya penanggulangan terhadap bencana- bencana yang terjadi sebab menyangkut keselamatan hidup serta peradaban manusia.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	Muchammad Fajri (2018)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Perencanaan	Penelitian membahas tentang Collaborative Governanced dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota	Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fajri





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Tahun 2017</p>	<p>Malang yang dianalisis melalui 3 fase yaitu Fase Mendengarkan, Fase Dialog dan Fase Pilihan. Selanjutnya setelah dianalisis melalui tiga tahapan tersebut, penulis juga mencermati kriteria keberhasilan collaborative governance sebagai hasil akhir penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kolaborasi antar aktor dalam proses perencanaan RTH belum berjalan dengan baik, namun dalam Collaborative Governance telah sesuai dengan kriteria keberhasilan.</p>	<p>menunjukkan bahwa collaborative governance memberikan keberhasilan dalam Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Di. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan melihat bagaimana collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai.</p>
<p>Nasot Tua Collaborative</p>	<p>Kajian ini menyarankan agar</p>	<p>Penelitian yang</p>

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Parlindungan Sihaloho (2022)</p> <p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p><i>governance</i></p> <p>Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan</p>	<p>aspek pengelolaan banjir di Kota Medan harus diikuti dengan mengutamakan aspek tata kelola dan akuntabilitas alokasi, diikuti aspek lainnya, antara lain: akses, pembagian informasi, arsitektur jaringan, dan kepemimpinan. Ketika menerapkan kebijakan kolaboratif selama periode prediksi, <i>collaborative governance</i> harus lebih ditekankan kepada pemangku kepentingan akademik dan pengembang perangkat lunak, karena hasilnya berguna selama fase pengurangan Minimisasi dan Pemulihan</p>	<p>dilakukan Nahot Tua</p> <p>Parlindungan Sihaloho menggambarkan <i>Collaoborative Governace</i> penanggulangan banjir di Kota Medan sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil Kota Dumai sebagai objek yang dilihat terhadap penanggulangan banjir.</p>
<p>3</p> <p>Heru Rochmansjah</p>	<p><i>Collaborative governance</i></p>	<p>Penelitian mengungkapkan bahwa</p>	<p>ini Penelitian yang dilakukan Heru</p>



UIN SUSKA RIAU

<p>(2022)</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bandung</p>	<p>penanggulangan banjir pada Kota Bandung tidak terlaksana secara maksimal terlebih dalam poin collaboration dynamic juga belum dilaksanakan secara optimal. Hal itu terjadi karena masih dominannya unsur pemerintah dalam merencanakan, merumuskan, dan menetapkan program- program dan aktivitas. Hadrinya aturan mengenai forum penanggulangan bencana juga tidak berjalan secara efektif. sebagai akibatnya tiap-tiap aktor cenderung melakukan kegiatannya secara individual. Diketahui juga bahwa contoh <i>collaborative governance</i> penanggulangan banjir yang berlangsung di</p>	<p>Rochmansjah menggambarkan mengenai Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kota Medan sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil Kota Dumai sebagai objek yang dilihat terhadap penanggulangan banjir.</p>
---	--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			<p>Kota Bandung menempatkan pemerintah menjadi stakeholder primer sekaligus driver.</p> <p>Terbentuknya forum Pengurangan Risiko bencana (FPBR) membuka peluang bagi terakomodasinya aspirasi dan kepentingan stakeholder lain dalam collaboration dynamics sehingga akan terdapat koneksitas yang permanen di antara para stakeholder dan sinergitas sumber daya dalam kolaborasi penanggulangan banjir.</p>	
4	M. Adi Perwira Raya (2020)	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana	Penelitian yang dilakukan mengungkap beberapa aspek strategi berupa strategi organisasi yang dikenal dengan Grand Strategy yang menciptakan strategiditinjau	Pada penelitian ini penulis mengungkapkan penanggulangan banjir yang ditinjau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Banjir Kabupaten Barito Kalimantan Selatan	Dipengurangan risiko bencana yaitu mitigasi bencana terkait banjir hingga pengurangan risiko bencana, strategi program membentuk program dengan memperhatikan dua aspek , yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, strategi sumber daya, pelatihan, saran teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas staf, strategi kelembagaan melalui digitalisasi pengurangan risiko bencana, dan koordinasi antar lembaga kabupaten dan masyarakat	berdasarkan pendekatan Collaborative governance
Tika Mutiarawati, Sularmo (2021)	Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata pemerintahan yang menggunakan kolaboratif antara parateori Emerson dipemangku kepentingan dalam untul melihat bagaimana menyelesaikan banjir pasang surut di Kelurahan kolaborasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kota Pekalongan Tika	Bandengan dan untuk mengetahui faktor yang menghambatnya. Studi ini menggunakan teori De Seve untuk analisis maslaah ini.	untuk menanggulangi banjir di Kota Dumai.
Rismawati, Jaelan Usman, Adnan Ma'ruf 2015	Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah menjadi regulator, dinamisator dan fasilitator dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Manggala Kotadalam Makassar telah terlaksanamenanggulangi dengan optimal melalui berbagai kebijakan sertajuga ditinjau melakukan koordinasi dandari aspek lain memberikan fasilitas dalam penanggulangan banjir maupun akibat dampak banjir.
7 Bina Ade Prayoga Senawan,	Collaborative Governance dalam	Penelitian ini membahas tentang collaborative Governance dalam
		Dalam hal ini peneliti menggunakan



Eka Yulyana, Lina Aryani © Hak cipta milik UIN Suska Riau	Penanganan Banjir di Desa Tanjungari Kecamatan Cikarang Utara	Penanganan Banjir di Desa Tanjungari Kecamatan Cikarang Utara. Dengan menggunakan teori yang telah di konstruksi oleh Ansell dan Gash (2007) si peneliti melihat bagaimana kondisi awal hingga proses kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh stakeholder terkait penanggulangan banjir di daerah tersebut.	teori yang di knstruksi oleh Emmerson (2011).
---	---	---	--

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep bertujuan untuk memberikan pengetahuan sampai dimana batasan konkrit dari objek yang akan di teliti, maka adapun defenisi konsep pada penelitian ini yaitu

1. *Collaborative governance* adalah sebuah proses dimana aktornya saling terlibat untuk melakukan kerjasama yang didasarkan pada keberadaan "tata kelola" multi pemangku kepentingan yang lain seperti sektor swasta dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau lain-lain yang diterbitkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penanggulangan bencana adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional, yakni rangkaian aktivitas menanggulangi yang dilakukan sebelum-pada saat-setelah terjadi bencana.
3. Banjir Menurut Suripin (2003) adalah keadaan dimana air tidak dapat ditampung oleh sungai karena saluran yang tersumbat, sehingga meluap dan menggenangi daerah sekitarnya (flooded area).

9 Konsep Operasional

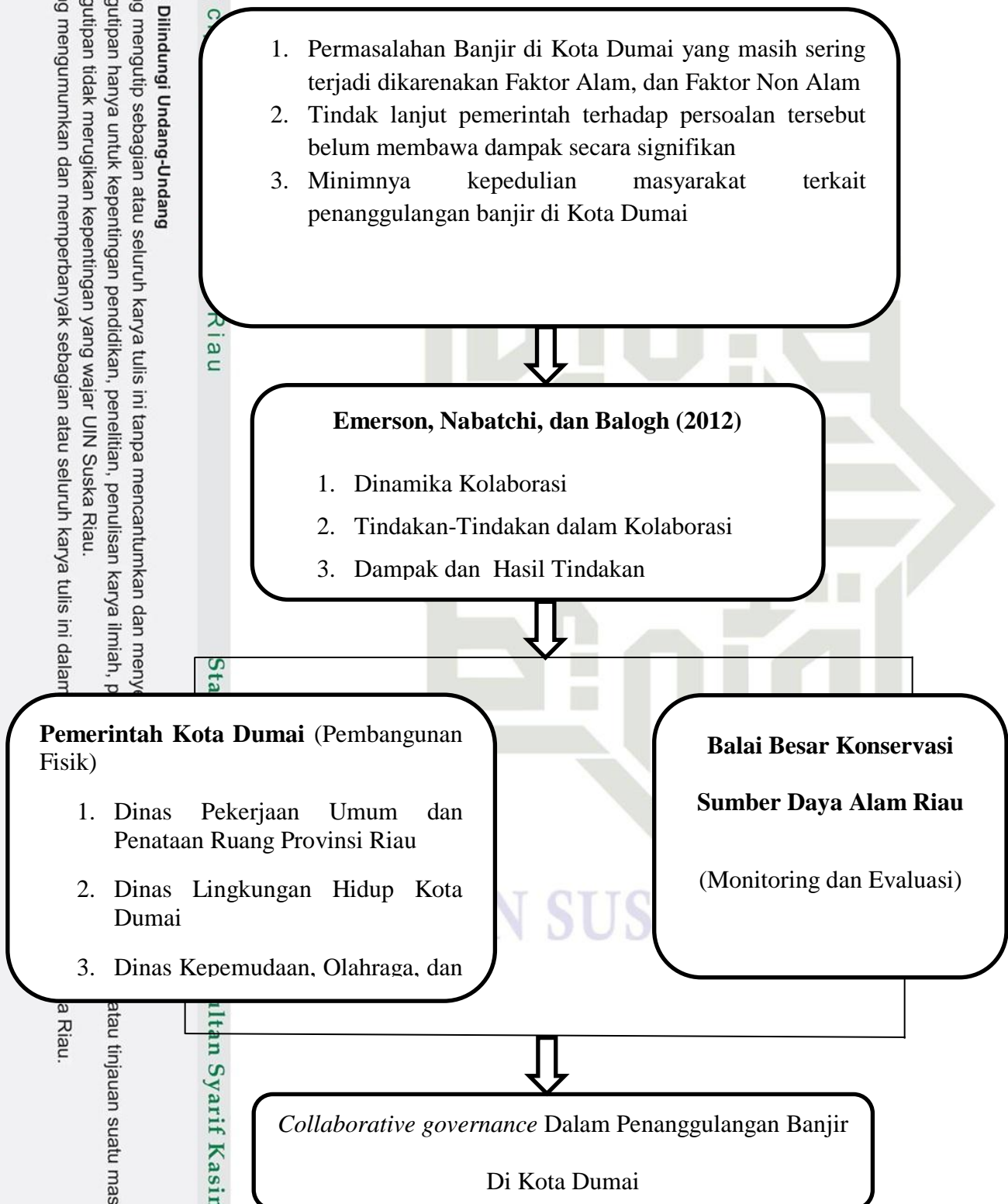
Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep/Referensi	Indikator	Sub Indikator
Model <i>Collaborative Governance Regime</i> yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Walogh (2011)	1. Dinamika Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Pergerakan prinsip bersama (Principled engagement) b. Motivasi bersama (Shared Motivation) c. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (Capacity For joint action)
	2.Tindakan-Tindakan dalam Kolaborasi (Actions)	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya keikutsertaan dari pelaku dalam pelaksanaan program b. Ketergantungan para stakeholder
	3.Dampak dan Hasil Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> a. Dampak jangka pendek b. Dampak jangka panjang



2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel, dan sebagainya.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun, termasuk elektronik, tanpa izin dari UIN Suska Riau.

atau tinjauan suatu masalah.

Altan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan dalam menganalisis aktivitas, peristiwa atau situasi secara sosial. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, serta mengetahui sifat-sifat serta pengaruh sosial yang tidak mampu diuraikan oleh metode kuantitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini berlokasi Penelitian ini berada di Kota Dumai, Provinsi Riau. Dalam hal ini penulis menggali informasi penerlitan di beberapa instansi pemerintahan seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Duma, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, serta Dinas Pariwisata Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada bulan November pada tahun 2022 hingga Mei 2023.

3.3 Sumber Data

Data menjadi bagian krusial dari penelitian sebagai fakta tertulis untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat diverifikasi lengkap (Irawan, 2004). Untuk menunjang tahapan pnelitian maka tentunya peneliti membutuhkan data yang akurat serta realistis tentang objek peneitian. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber dan telah teruji keabsahannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk penelitian ini, data didapatkan melalui dua kategori yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh subjek penelitian. Sumber data ini terdiri dari narasumber serta pengamat yang digunakan sebagai informan dan orang-orang yang dipercaya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang persoalan yang sedang dikaji. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek yang terlibat pada proses *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Dumai.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah ragam informasi yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh data yang dirilis dari situs resmi, buku, publikasi ilmiah, artikel jurnal, serta literatur lain untuk mendukung penyempurnaan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kota Dumai.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam melakukan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan yang telah dikhususkan untuk mengetahui informasi mengenai persoalan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua arah yakni pewawancara yang memberikan pertanyaan kemudian yang



- © Pak Iptek miki UN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwawancarai akan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan pada *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksudkan yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari subjek penelitian serta data setiap file tertulis atau film, bukan catatan, dll.

5.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu/kelompok yang mampu menjelaskan suatu fenomena. Bentuk dari informan penelitian sangat beragam diantaranya adalah orang, benda maupun lembaga (organisasi). . Dalam menentukan informan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci (key), yaitu cara pemilihan informan yang ditetapkan karena mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau seseorang yang paling bisa menguatkan sumber data dalam penelitian.

UIN SUSKA RIAU

Adapun key informan pada penelitian ini, yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	1 Orang
2	Staff Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai	1 Orang
3	Kepala UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai	1 Orang
4	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Orang
5	Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	1 Orang
6	Kepala Bidang Kerjasama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	1 Orang
7	Staff Hidrologi Balai Wilayah Sungai Sumatera III	1 Orang
8	Lembaga Swadaya Masyarakat	1 Orang
	Warga Terkena Dampak Banjir	3 Orang
	Jumlah	11 Orang

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman, model ini berawal dari pengumpulan data mentah, mendisplay data, reduksi data, dan sampai ke verifikasi dan kesimpulan data.

Penjelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Reduksi data

Reduksi data adalah suatu kegiatan untuk menyederhana, mengklasifikasi, dan menghapus catatan-catatan yang kurang relevan.

Penyajian Data

Data display adalah suatu upaya untuk menampilkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan.

Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan pertama yang disodorkan masih bersifat sementara, serta dapat diubah jika tidak terlihat bukti-bukti yang unggul untuk mengoptimalkan data yang dikumpulkan. Apabila kesimpulan yang ditampilkan pada tahap pertama didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Gambaran Umum Kota Dumai

4.1 Sejarah Singkat Kota Dumai

Sejarah nama Kota Dumai bermula dari kisah zaman dulu tentang sebuah Kerajaan Seri Bunga Tanjung, dalam cerita Legenda Putri Tujuh. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima, yang memiliki tujuh orang putri. Menurut cerita rakyat tentang Putri Tujuh, kata Dumai berasal dari kata di Lubuk Umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi Dumai.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang berdiri atas beberapa rumah nelayan dan berada di pesisir Timur Provinsi Riau, Indonesia. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut:

1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah kecamatan Rupert
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewedanan
4. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarluaskan seluruh karya tulis ini tanpa seizin penerbit.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kota Madya sehingga menjadi Kota Madya Dati II Dumai. Dengan perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 tahun 1999 maka Kota Madya Dumai berubah menjadi Kota 44 Dumai.

Dumai diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999, Sebelumnya, statusnya adalah sebagai kota administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dimulai pada 27 April 1999. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Pada awal pembentukannya. Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Sekarang Dumai merupakan nama sebuah kota di Provinsi Riau, yang terletak sekitar 188 kilometer dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km², sebelumnya Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Monokrowi. Namun semenjak Monokrowi pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi yang terluas. Saat ini Kota Dumai sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Kini, Dumai yang kaya dengan minyak bumi itu, berubah menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999.



4.1.2 Visi Misi Kota Dumai

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Misi harus mengacu pada visi yang telah ditetapkan.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak visi atau misi yang bertentangan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah :
 "Mewujudkan Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

4.1.3 Letak Geografis Kota Dumai

Letak dan Luas Wilayah

Kota Dumai terletak pada posisi antara 10 23'00'' - 10 24'23'' Lintang Utara dan 101o 23'37'' - 101o 28'13'' Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 1,727.38 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.
- Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 1.727,38 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan dengan jarak ke ibukota Kabupaten terjauh adalah Kecamatan Medang Kampai.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Dumai Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Bukit Kapur	200,00	11,58
2	Medang Kampai	373,00	21,59
3	Sungai Sembilan	975,38	56,47
4	Dumai Barat	44,98	2,60
5	Dumai Selatan	73,50	4,25
6	Dumai Timur	47,52	2,75
7	Dumai Kota	13,00	0,75
Total Luas Kota Dumai		1.722,38	100,00

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022

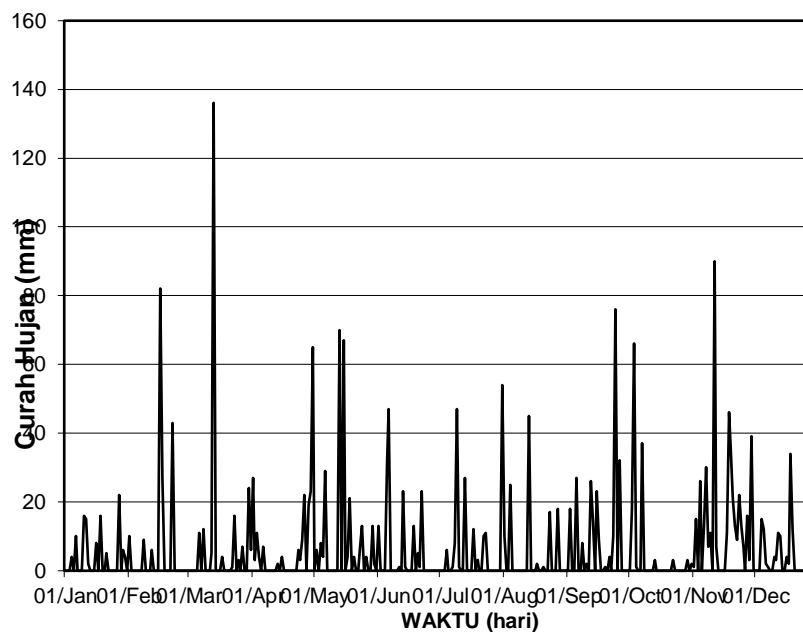


- Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian wilayah Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian Utara dan sebagian dataran tinggi di bagian Selatan. Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang.

Kota Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2021 berkisar antara 21,7 0 C - 36 0 C dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak di Kota Dumai terjadi pada bulan Oktober yaitu 30,6 mm³, sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan Februari yaitu 67,6 mm³. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September sebanyak 3 hari dan terkecil pada bulan Februari yaitu sebanyak 6 hari.

HIDROGRAF CURAH HUJAN POS CURAH HUJAN DUMAI TAHUN 2020

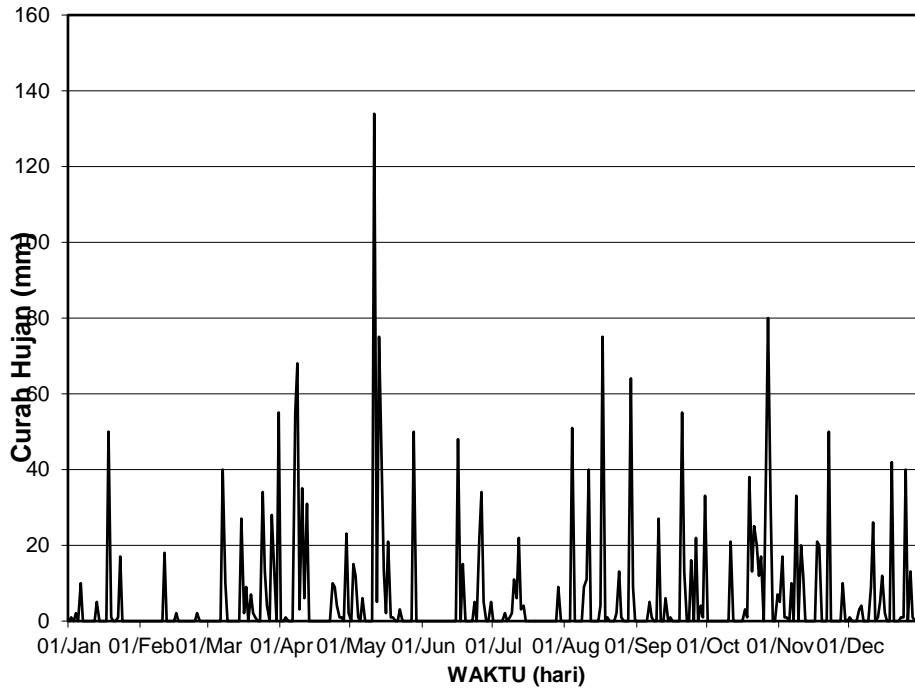


Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Hidrologi, Balai Wilayah Sungai Sumatera III



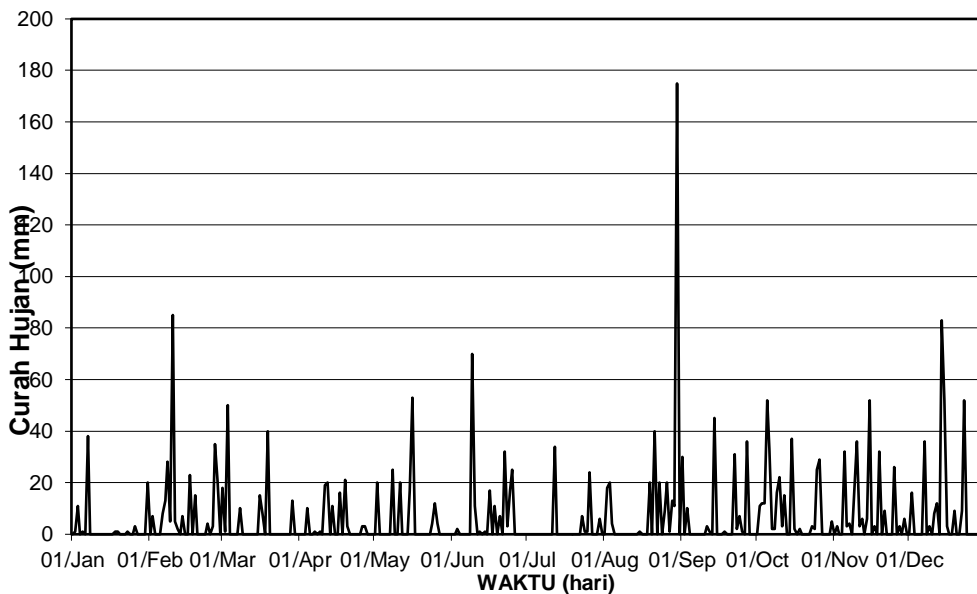
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HIDROGRAF CURAH HUJAN POS CURAH HUJAN DUMAI TAHUN 2021



Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Hidrologi, Balai Wilayah Sungai Sumatera III

HIDROGRAF CURAH HUJAN POS CURAH HUJAN DUMAI TAHUN 2022



Sumber : Unit Pelaksanaan Teknis Hidrologi, Balai Wilayah Sungai Sumatera III



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyertakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Pakipta mik UIN Suska Riau
Stage Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2 Gambaran Umum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

4.2.1 Sejarah Singkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar KSDA Riau. Pada tahun 1978, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai Organisasi saat itu Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya I Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan.

Pada tahun 1969 tepat tanggal 1 April 1969, Sdr. Jujung Mudjizat Sudarma sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf. Pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hardjodiwiryo, M.Sc. sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau. Pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suyono. Pada tahun 1980, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy. Pada tahun 1990, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Marpurwasuka.

Pada tahun 1991, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Harapan Napitupulu. Pada tahun 1994, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammuell Panggabean dan pada tahun 1995, Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si. Pada tahun yang sama Sub Balai Konservasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Daya Alam Riau berganti nama menjadi Unit Konservasi Sumber Daya

Alam Riau. Pada tahun 2001 digantikan oleh Ir. John Kennedy, M.M.

Pada tahun 2002, oleh karena wilayah kerja serta bertambahnya beban

ugas Pokok dan Fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002.

Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan eselonnya menjadi eselon

II.A dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau (Balai KSDA

Riau) dan pada tanggal 15 Juli 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber

Daya Alam Riau digantikan oleh Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal

13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi

Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-

1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan yang diganti dengan P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana dan Surat Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-

Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) meng-induk pada Direktorat Jenderal

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.



© Pak Ipt & mik Mik UIN Suska Riau
 © Ste Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal: 2
 Cipta: 8
 Silindri: 1
 Ulangi: 1
 Undang-Undang: 1
 Pelanggaran: 1
 Mengutip: 1
 Sasial: 1
 Kata: 1
 Seluruh: 1
 Karya: 1
 Tulis: 1
 In: 1
 Dapat: 1
 Uraikan: 1
 dan: 1
 menyebutkan: 1
 sumber: 1

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Wilayah kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan.

Secara geografis, wilayah kerja BBKSDA Riau terletak antara 1° 09' Lintang Selatan – 4° 45' Lintang Utara dan 100° 45' – 109° 00' Bujur Timur dengan luas wilayah 329.867 Km² yang terdiri atas daratan seluas 94.561 Km² (28,67%) dan lautan/perairan seluas 235.306 Km² (71,33%). Dari luas daratan 94.561 Km² tersebut, terdapat 17 kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA Riau, baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, dengan luas keseluruhan ± 440.539,59 hektar.

Kawasan Konservasi yang dikelola BBKSDA Riau terdiri dari 10 Suaka Margasatwa, 2 Cagar Alam, 3 Taman Wisata Alam, 1 Taman Buru, 1 Taman Nasional Zamrud dan 4 KSA/KPA. BBKSDA Riau sebagai organisasi Eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai 4 (empat) jabatan Eselon III dan 9 (sembilan) jabatan Eselon IV. Diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang dipublikasikan dan diterbitkan di media massa atau elektronik tanpa memberikan sumber yang jelas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sehingga jabatan eselon IV di Balai Besar KSDA semula sembilan jabatan menjadi 4 Jabatan.

Dengan adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 187/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2020 Tentang Penetapan Fungsi Dalam fungsi Pokok Kawasan Pelestarian Alam Mahato sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Tuanku Tambusai di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Seluas ± 1.345 Ha. Maka satu dari 4 KSA/KPA yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Riau yaitu KSA/KPA Mahato menjadi Hutan Taman Raya Tuanku Tambusai yang pengelolaannya di Kabupaten Rokan Hulu yang semula Balai Besar KSDA Riau Mengelola 21 Kawasan Konservasi menjadi 20 Kawasan konservasi dengan luas keseluruhan ± 439,192.29 Hektar (BBKSDA RIAU, 2022)

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar KSDA Riau

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, yang diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau (BBKSDA Riau) adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupert.

Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - i. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
 - j. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
 - k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - l. Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - m. Pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;
 - n. Koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
 - o. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;
 - p. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
 - q. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - r. Pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
 - s. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- t. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

2.3 Taman Wisata Alam Sungai Dumai

Kawasan hutan wisata sungai dumai ditunjuk berdasarkan SK.Gubernur RDH Tk I Riau No.85/I/1985 Tanggal 23 Januari 1985 dengan luas kawasan 1.000 Ha dan penetapan kawasan berdasarkan SK.Menhut No.154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990 dengan luas kawasan 4.712,50 Ha. Secara Geografis terletak di 1 31-1 38LU dan 100 31-101 28BT.Kawasan ini terletak di wilayah Administrasi Kota Dumai Prov Riau. Secara Administrasi Kehutanan berada di bawah pengawasan Seksi Konservasi Wilayah III Bidang KSDA Wiayah II Balai Besar KSDA Riau. Ditetapkan sebagai Hutan wisata karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kriteria hutan wisata.

Potensi Kawasan :

- Flora : Meranti (*Shorea parfivolia*), Durian (*Durio sp*), Kempas (*Koompasia malaccensis*), Bintangur (*Callophylum solatrii*)
- Fauna : Harimau sumatera (*Phanthera tigris sumatrae*), Macan dahan (*Neofelis nebulosa*), Ungko (*Hylobates agilis*), Rangkong (*Rhyticeros undulatus*), Rusa (*Cervus sp*)
- Ekosistem : Hutan hujan tropis dataran rendah dengan type hutan rawa kering



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Potensi Jasa Lingkungan : Obyek Wisata Alam Sungai Dumai yang bisa dijadikan objek wisata. Potensi jasa lingkungan yang dapat dinikmati di TWA Sungai Dumai adalah sebagai berikut

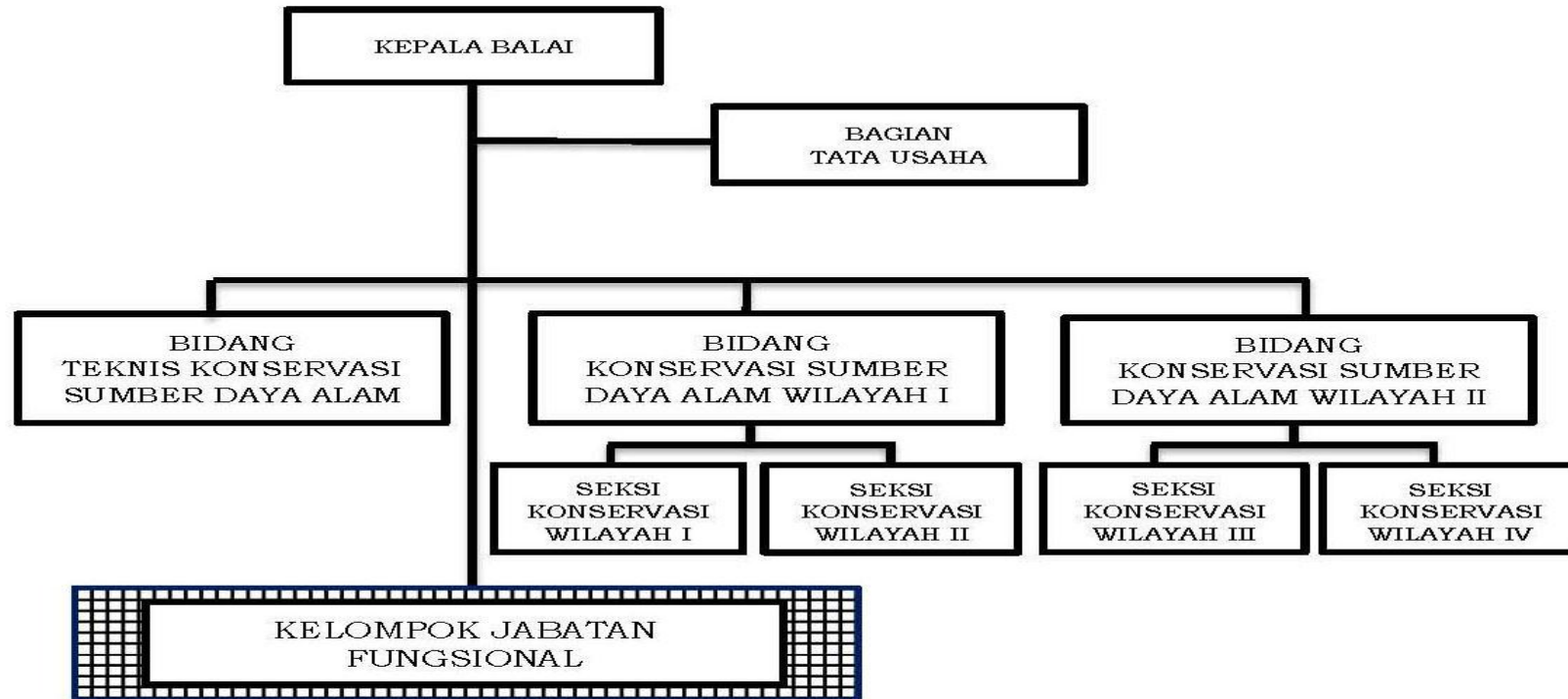
1. Wisata Perkemahan
2. Spot Photo (photo hunting dan photo prewedding)
3. Pengamatan Satwa Liar (Animal Watching)
4. Pemanfaatan Air

Aksesibilitas Kawasan :

Taman Wisata Alam Sungai Dumai berada di Kota Dumai yang merupakan kota tua di Provinsi Riau. Untuk mencapai kawasan TWA Sungai Dumai dari pusat Kota Pekanbaru dapat ditempuh melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan rute Pekanbaru-Dumai 215 km dengan waktu tempuh 5,5 jam dan dari Dumai ke lokasi TWA kurang lebih 10 menit. Selain jalan darat, juga dapat dicapai dengan menggunakan moda transportasi laut dari Pekanbaru, Bengkalis dan Siak. Kota Dumai secara geografis memiliki batas luar yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura, sehingga kedepannya sangat memungkinkan aksesibilitas ke kawasan TWA Sungai Dumai dapat ditempuh dari kedua negara tersebut. Pada saat ini dari Kota Dumai sudah terdapat jalur transportasi yang menghubungkan Kota Dumai dengan wilayah Malaka yang merupakan bagian dari wilayah Negara Malaysia

4.2.4 Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B



UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM
RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.3 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

4.3.1 Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Sebelum terbentuknya Dinas PUPR, terdapat beberapa kali perubahan nomenkelatur dan susun organisasi. Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829) Tanggal 20 April 1999 Kota Administratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai no 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Kebersihan, yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. Wan Syamsir Yus. Kemudian pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan daerah no. 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah berubahlah nomenkelatur terbuntuklah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Kebersihan menjadi terbuntuklah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Dumai.

Perubahan nomenkelatur ketiga pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai yang ditetapkan oleh Walikota Dumai pada saat itu yaitu H. Zilkifli A.S. Perubahan keempat terjadi pada Tahun 2018, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, berubahlah



HandCipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengcantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nomenkelatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, dan nomenkelatur ini dipakai sampai saat ini.

3.3.2 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai menetapkan visi sebagai berikut : "Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2022"

Misi

Adapun misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai yaitu "Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar"

3.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas maka menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan ;

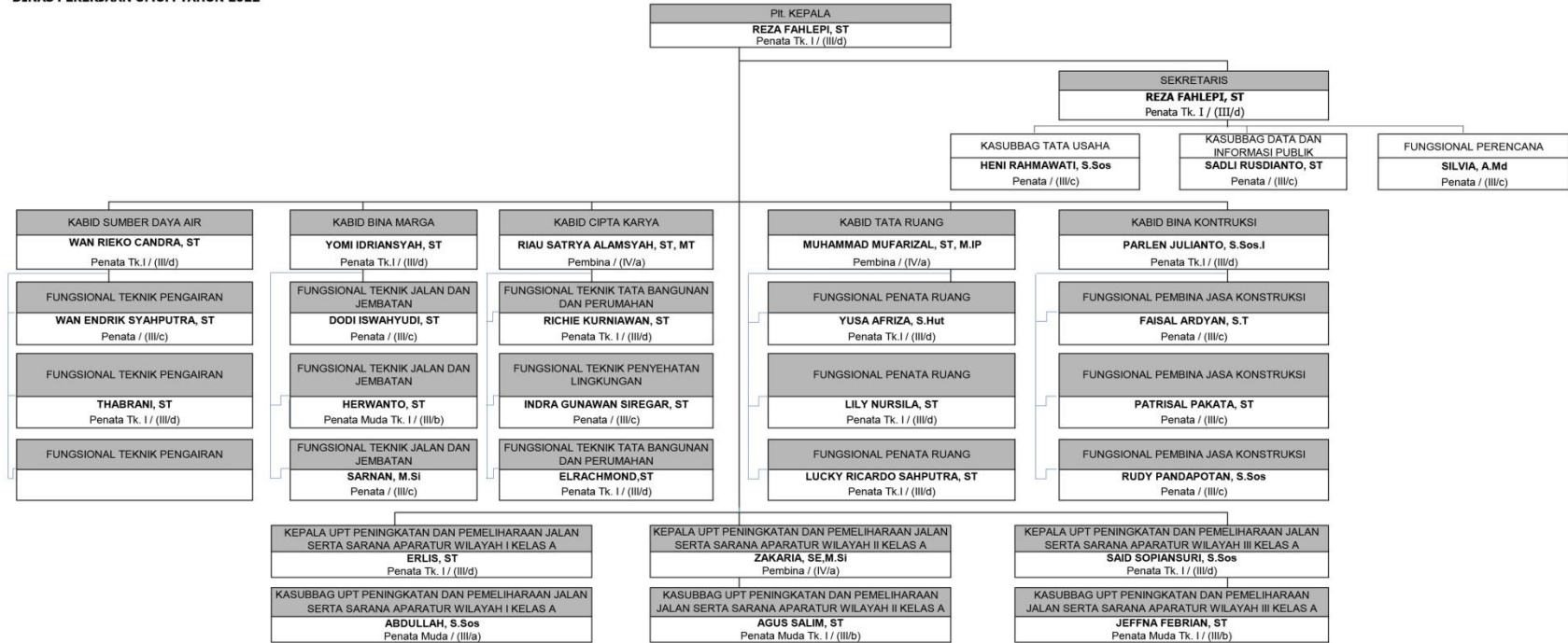


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2022



WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Gambaran Umum Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

4.4.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memiliki visi sebagai berikut :
 Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu"

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan untuk mendukung kinerja maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai memiliki misi yaitu "Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas"

4.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas maka Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

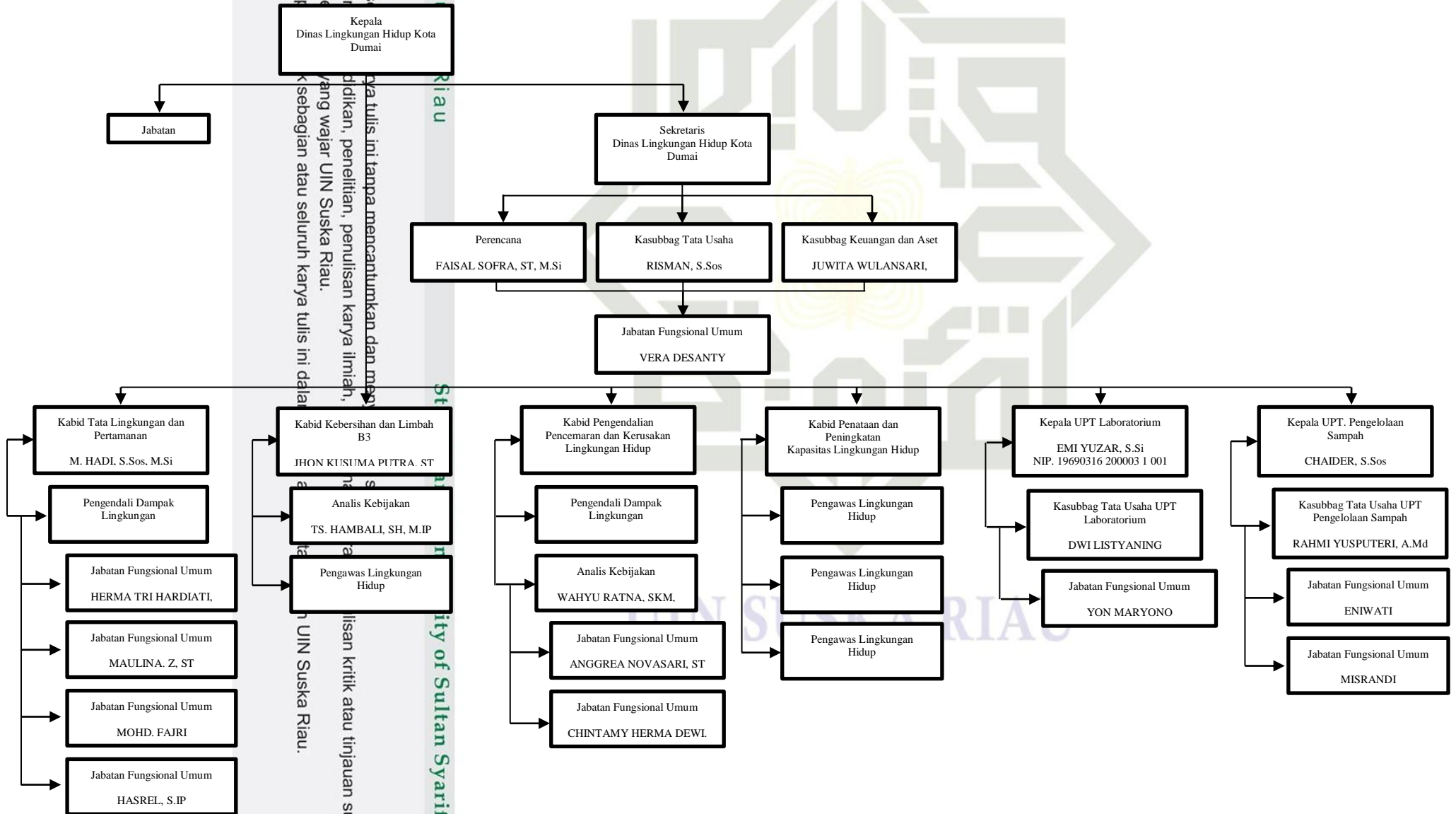
- a. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas upt;
 - g. Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan dinas lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada wali kota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada wali kota melalui sekretaris daerah;
 - k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

4.4.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai





4.5 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai

4.5.1 Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Daerah Dumai No.16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 108 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan;
2. Mengkordinasi membina dan;
3. Mengendalikan serta melaksanakan urusan kegiatan dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
2. Perumusan kebijakan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pengkordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan daerah kabupaten atau kota lain dan provinsi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dengan maksud agar tercapainya tujuan publik yang tidak tercapai jika hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja. Collaborative governance sangat erat hubungannya dengan berbagai ragam kerjasama yang dilakukan antar stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu upaya dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik yang ada. Istilah kerja sama antar stakeholders yang melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat inilah yang diartikan sebagai collaborative governance.

Kolaborasi itu sendiri dimaknai sebagai upaya dalam pembentukan kerja sama, interaksi, serta kompromi antara beberapa elemen baik itu individu dengan individu lembaga dengan lembaga maupun pihak individu dengan lembaga yang kemudian terlibat dalam kolaborasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan mendapatkan akibat atau manfaat. Kemudian Proses kolaborasi yang dilakukan dalam Collaborative Governance terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai sudah terlaksana sejak tanggal 7 November 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut dibentuklah perjanjian kerjasama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Walikota



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Stae Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hal 31
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai dengan nomor : 660/1094.1/DPUPR dan nomor :
 PK.S.2652/K.6/BTU/KUM.3/11/2022 tentang Pembangunan Strategis Yang
 Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Embung Dan Sarana
 Pendukungnya Dalam Rangka Mitigasi Bencana Di Taman Wisata Alam Sungai
 Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Pada indikator dinamika kolaborasi, Proses penyatuan prinsip dalam
 rangka meningkatkan dinamika kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kota
 Dumai telah berlangsung atas inisiasi oleh Walikota Dumai. Mengingat masih
 belum optimalnya perbaikan yang dilakukan untuk menanggulangi banjir selama
 ini maka dari itu pemerintah melakukan kolaborasi lanjutan antara Pemko Dumai
 (DLH, Dinas PUPR, dan Diskopar) dengan Pihak BBKSDA Pekanbaru untuk
 dapat melakukan pemabangunan embung untuk menanggulangi banjir di Kota
 Dumai.

Dengan matangnya proses dinamika kolaborasi maka bermuar pada
 tindakan dalam kolaborasi. Dalam rencana kerja yang telah disuslkan, beberapa
 program dalam rangka mendukung penanggulangan banjir diantaranya di Dinas
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, program yang mereka
 jalankan adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan embung dan sarana
 pendukungnya, adapun turunan program tersebut diantaranya adalah : pengelolaan
 sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan dan lingkungannya.
 Selanjutnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, agenda yang mereka
 jalankan adalah dukungan pengelolaan keanekaragaman hayati serta melakukan
 pengelolaan sampah agar debit banjir dapat ditekan, sejalan dengan itu apabila



pembangunan embung sudah selesai, maka nantinya pemerintah kota Dumai akan menjadikan destinasi wisata yang akan dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Adanya beberapa indikator kolaborasi yang belum berjalan seperti terlihat dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan setelah proses kolaborasi selesai. Mengingat dampaknya baru dapat dirasakan setelah pembangunan selesai. Sedangkan untuk proses kolaborasi lainnya yaitu dinamika kolaborasi dan tantangan dalam kolaborasi sudah mulai berjalan dengan menghasilkan tujuan kolaborasi yaitu kesepakatan menanggulangi kolaborasi berdasarkan tupoksi dinas yang terlibat, akan tetapi tupoksi yang ditetapkan juga masih belum optimal.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci dalam data kelola kolaboratif pada penanggulangan banjir di Kota Dumai maka penulis memberikan saran untuk mendukung collaborative governance yang lebih baik. Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai adalah :

Kepada Pemerintah Kota Dumai dan BBKSDA Riau

- a. Dibutuhkan kebijakan yang dapat mengatur ruang kolaborasi agar *collaborative governance* dalam menanggulangi banjir di Kota Dumai menjadi lebih maksimal, terutama bagi pihak pemerintah yang telah menandatangani kerjasama. Mengingat tupoksi yang telah ditetapkan hanya sebatas pembangunan fisik saja, maka dalam hal ini perlu di perhatikan



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan non fisik yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Partisipasi dari pihak swasta dalam menanggulangi banjir di Kota Dumai juga harus disertakan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah. Swasta dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak terselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal penanggulangan banjir di kota Dumai pihak swasta bisa diikutseratakan dalam pembangunan embung dan pengelolaan wisata. Objek wisata yang profesional dapat berjalan melalui koordinasi dari berbagai pihak dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, serta daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.

Perlu adanya himbauan kepada masyarakat terkait peran yang dapat mereka laksanakan dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga tidak memperparah intensitas banjir di Kota Dumai.

Kepada Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat penulis berikan kepada peneliti selanjutnya adalah melihat bagaimana hasil pembangunan fisik dalam menanggulangi banjir di Kota Dumai serta melihat sejauh mana keberhasilan collaborative governance dalam menanggulangi banjir di Kota Dumai

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

- Qs. Al-Ankabut (29) : 14
 Qs. Ar-Rum (30) : 41
 Qs. Asy-Syura (42) : 30

Artikel Jurnal:

- stuti, A. F., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci. *Jurnal Konstruksi*, *Vii*(3), 163–170.
- Uma Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir Di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/Jiwp>, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *3*(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Pendt, Thomas Christian, 2010, *Introducing Electronic Suplly Chain Collaboration in China: Evidence from Manufacturing Industries*. Berlin : Universitatsverlag der Technischen Universitat Berlin.
- Harley, James & Blismas, Nick, 2010, *An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment*, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), *e-Research Collaboration : Theory, Techniques and Challengers*, Hlm.15-32, Heidelberg: Springer International Publishing.
- Hetifah, S.J Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Holzer, Marc, et al. (2012). An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Services. Dalam Lauer Schachter, Hindy Kaifeng, Yang (Ed). *The State of Citizen*
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 30–39. <https://doi.org/10.30596/Interaksi.V3i1.2694>



Hermawan, C., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu. *Ejournal Ilmu Pemerintah*, 7(1), 465–478.

Khairul Rahmat, H., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.47435/Mimbar.V6i1.372>

Maghfur, I. (2017). Manajemen Islam: Ruang Lingkup, Kajian Dan Perkembangan Ilmu Manajemen Islam Di Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonmi Islam*, 9, 1–16.

Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 82–98.

Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 49–55. <https://doi.org/10.23917/Jpis.V29i1.8203>

Philia Christi Latue, Juan Steiven Imanuel Septory, Glendy Somae, H. R. (2023). *Pemodelan Daerah Rawan Banjir Di Kecamatan Sirimau Menggunakan Metode Multi-Criteria Analysis (Mca)*. 18, 20–23.

Pradika, M. I., Giyarsih, S. R., & Hartono, H. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 261. <https://doi.org/10.22146/Jkn.35311>

Rahayu, H. P., Haigh, R., Amaratunga, D., Kombaitan, B., Khoirunnisa, D., & Pradana, V. (2020). A Micro Scale Study Of Climate Change Adaptation And Disaster Risk Reduction In Coastal Urban Strategic Planning For The Jakarta. *International Journal Of Disaster Resilience In The Built Environment*, 11(1), 119–133. <https://doi.org/10.1108/Ijdrbe-10-2019-0073>

Rahmat, H. K., Syarifah, H., Kurniadi, A., Putra, R. M., & Wahyuni, S. W. (2021). Implementasi Kepemimpinan Strategis Guna Menghadapi Ancaman Bencana Banjir Dan Tsunami Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.33172/Jmb.V7i1.627>

Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/Jim.V6i1.2022.161-174> sebaiknya diperlukan perencanaan untuk menetapkan standar atau indikator keberhasilan program

dan indikator kinerja utama pada masing- masing instansi yang terlibat (SKPD dan Kelompok Usaha) dalam pelaksanaan program di dalam struktur kelompok kerja tersebut. Hal tersebut untuk memudahkn melakukan evaluasi pada masing-masing instansi sehingga hasil kinerja seluruh instansi yang terlibat dapat diukur keberhasilannya.

Participation in America. (PP. 349-386). Charlotte: Information Age Publishing.

Ukouloudis, A., Leal Filho, W., Deligiannakis, G., Vouros, P., Nikolaou, I., & Evangelinos, K. (2023). Coping With Floods: Impacts, Preparedness And Resilience Capacity Of Greek Micro-, Small- And Medium-Sized Enterprises In Flood-Affected Areas. *International Journal Of Climate Change Strategies And Management*, 15(1), 81–103. <https://doi.org/10.1108/Ijccsm-09-2022-0122>

Hutama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606.

Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tangerang Selatan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 8, 534–548. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2760>

Mulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Benana Banjir Di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 7(3), 150–159. <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/771/778>

Undang-Undang

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI”

1. Dinamika Kolaborasi

a. Pergerakan Prinsip Bersama

1. Apakah ada pertemuan yang membahas mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai?
2. Siapa yang menginisiasi pertemuan mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
3. Apakah pertemuan mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut sudah terlaksana?
4. Pertemuan tersebut dilakukan secara online/offline?
5. Apakah pertemuan mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut dilakukan secara rutin? (sebutkan jadwal)
6. Siapakah yang hadir dalam pertemuan mengenai penanggulangan banjir di Kota Dumai tersebut?
7. Mengapa stakeholder menghadiri pertemuan tersebut? (alasan per masing-masing stakeholder)
8. Apakah setiap stakeholder/perwakilan mengemukakan pandangannya terhadap isu banjir di kota Dumai tersebut?
9. Apakah setiap stakeholder telah menyatakan kepentingan yang sama pada pertemuan tersebut?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apakah yang menjadi alasan ataupun kepentingan dari masing-masing stakeholder untuk terlibat dalam kolaborasi?

11. Apakah tujuan/sesuatu yang akan dicapai dari pertemuan tersebut?

12. Apakah setiap stakeholder sepakat untuk melakukan proses untuk mencapai tujuan bersama?

13. Seperti apa bentuk kesepakatannya?

14. Apakah ada kelompok kerja yang dibentuk dalam pertemuan tersebut?

15. Apa saja fungsi dan peran dari masing-masing stakeholder yang telah disepakati secara bersama?

16. Nilai-nilai apa yang disepakati yang nantinya akan diterapkan dalam collaborative governance di Kota Dumai?

b. Motivasi Bersama

1. Apakah nilai-nilai yang disepakati dalam collaborative governance di Kota Dumai sudah diterapkan?

2. Apakah pemimpin kolaborasi terus mengingatkan nilai-nilai tersebut untuk terus diterapkan?

3. Siapakah yang cenderung tidak menerapkan nilai-nilai tersebut?

4. Apakah masing-masing stakeholder dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan perannya terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?

5. Apakah yang menjadi dasar/syarat para stakeholder dapat dipercaya pada proses penanggulangan banjir di kota Dumai?

6. Sudahkah antara actor/stakeholder mempercayai kapasitas actor lain dalam menyelesaikan isu banjir di kota Dumai?

7. Apa yang menjadi alasan bahwa para stakeholder dapat dipercaya?
8. Kemudian sudahkah ada pembagian peran dan fungsi dari masing-masing stakeholder dalam penanggulangan banjir di Kota Dumai?
9. Apakah masing-masing stakeholder dapat memahami tugas dan perannya terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?
10. Apakah masing-masing stakeholder saling berkordinasi dalam menjalankan tugas dan perannya baik di dalam ataupun di luar dari rapat agenda?
11. Apakah masing-masing stakeholder sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas dan perannya terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?
12. Seperti apa contoh dari komitmen yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?

Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

1. Apa saja yang menjadi kebutuhan masing-masing stakeholder mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai ?
2. Apakah kebutuhan tersebut sudah diketahui secara bersama?
3. Apakah kebutuhan mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut telah dipenuhi?
4. Apakah dalam berkolaborasi mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai ada SOP yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama?
5. Apakah SOP tersebut sudah diterapkan dalam proses kolaborasi?



6. Apakah kolaborasi mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut memiliki landasan hukum?
7. Apakah ada aturan formal/informal yang diterapkan dalam proses kolaborasi?
8. Siapakah yang menjadi pemimpin dalam kolaborasi mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
9. Apakah pemimpin memfasilitasi pertemuan terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
10. Apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan kolaborasi mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai?
11. Apakah pemimpin sudah memfasilitasi kebutuhan para stakeholder terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?
12. Di zaman sekarang, teknologi menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu manusia/kelompok untuk menyelesaikan hal, sudahkah dalam hal ini para stakeholder menggunakan teknologi untuk menanggulangi banjir di kota Dumai?
13. Apa hambatan bagi pemimpin dalam memfasilitasi pertemuan terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?
14. Apakah dalam pertemuan, para stakeholder menyampaikan informasi mengenai proses dan capaiannya?
15. Apakah contohnya? (per actor)
16. Apakah ada umpan balik dari stakeholder dalam proses pembagian informasi mengenai capaiannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dari mana sumber dana untuk menanggulangi banjir kota Dumai?
18. Berapa besar anggaran terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?
19. Bagaimana pembagian anggaran untuk setiap stakeholder terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?
20. Anggaran tadi dialokasikan untuk apa saja? (per stakeholder)
21. Kapan anggaran akan dibagikan?
22. Sudah anggaran tadi dapat mengcover kebutuhan tersebut?

2. Tindakan Kolaborasi

1. Apakah ada program yang diusulkan untuk menanggulangi banjir di Kota Dumai?
2. Seperti apa bentuk program tersebut (jangka pendek dan jangka panjang)?
3. Adakah analisis SWOT terhadap program penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
4. Apakah analisisnya melibatkan setiap stakeholder?
5. Apakah program penanggulangan banjir di kota Dumai sudah terlaksana?
6. Siapa yang menjalankan program penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
7. Apakah setiap stakeholder turun tangan dalam pelaksanaan program penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
8. Apakah kemudian program tersebut akan rutin dilaksanakan?
9. Berapa anggaran yang diperlukan dalam program tersebut?
10. Darimana anggaran tersebut berasal?

11. Apa saja yang menjadi kekurangan/kelebihan dalam pelaksanaan program mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai?
12. Kemudian apakah program tersebut akan diinovasikan?
13. Sudahkah program yang telah diinovasikan akan diterapkan kembali?

3. Dampak dan Adaptasi

1. Bagaimana hasil dari program mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai tersebut?
2. Apakah hasil dari program penanggulangan banjir di Kota Dumai membawa perubahan yang signifikan?
3. Jelaskan alasannya (baik sudah ataupun belum)
4. Apa saja kendala yang dihadapi dari program mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai?
5. Apakah setiap actor mampu menghadapi kendala yang ada dari program mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai?
6. Apakah hasil dari program mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai telah sesuai dengan yang diharapkan oleh para stakeholder?
7. Bagaimana sikap para actor setelah program mengenai penanggulangan banjir di kota Dumai sudah terlaksana?
8. Setelah program tersebut, apa yang menjadi harapan para actor terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Daftar Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Staff Bidang Kerjasama Pemerintah Kota Dumai



Wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala UPT. Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai



Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau



Wawancara dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III



Wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Pencinta Alam Bahari



Wawancara dengan Masyarakat Daerah Bumi Ayu Kota Dumai



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0581/Un.04/F.VIII/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 12 Januari 2023 M
 Sifat : Biasa 19 Jumadil Akhir 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

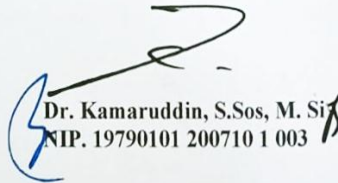
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nelvi Rahmadani
 NIM : 11970524745
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-1930/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023	Pekanbaru, 21 Februari 2023 M
Sifat	: Biasa	30 Rajab 1444 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nelvi Rahmadani
 NIM. : 11970524745
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyuni, SE, MM
 NIM 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54130
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1930/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 21 Februari 2023.** dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

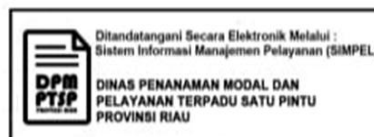
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NELVI RAHMADANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11970524745 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JL. BULUH CINA, GARUDA SAKTI KM. 1, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
4. WALIKOTA DUMAI
5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI (KOMISI 3)
6. BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU
7. PERTAMINA KOTA DUMAI
8. PELINDO KOTA DUMAI
9. CV. DUTA CIPTA LEANDER
10. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PENCINTA ALAM BAHARI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax. (0765) 3122-440360
D U M A I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0036/SKP/DPMPTSP/III/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dari DPMPTSP Pekanbaru - Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMPTSP / NON IZIN-RISET / 54130 Tanggal 23 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada:

Nama : **NELVI RAHMADANI**
No. Induk Mahasiswa : 11970524745
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Sri Kembar Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat Kab/Kota Dumai
Nomor Telp : 083190790552

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Walikota Dumai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Komisi 3), Pertamina Kota Dumai, Pelindo Kota Dumai, CV. Duta Cipta Leander dan LSM Pecinta Alam Bahari guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Kepala

HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jln. Brigjen H.R. Soebrantas Email : kotadumaibpbd@gmail.com
DUMAI

Dumai, 13 Maret 2023

Nomor : 800/ BPBD- SEKRE/ 105
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Dumai
 di-

Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Pelaksana Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai *menerangkan bahwa :*

Nama : NELVI RAHMADANI
 No. Induk Mahasiswa : 11970524745
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Jl. Sri Kembar Kel.Bagan Keladi Kec.Dumai Barat
 No.HP : 0831 9079 0552

Telah melaksanakan Penelitian dengan Judul ***Collaborative
 Governance Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai.***

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA PELAKSANA

 IRAWAN SUKMA, AP., M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19750816 199603 1 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSITEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU
PEKANBARU

Jln. H.R.Soebrantas Km. 8,5 Pekanbaru Kotak Pos. 1048 Telp. (0761) 63135 Email. tuksdariau@gmail.com

Nomor : S.064/K.6/BTU/PEG.1.0/04/2023 5 April 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Di
 Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Nomor: B-2558/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023 perihal Izin Riset an. Nelvi Rahmadani dengan ini di sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan dengan adanya mahasiswi yang akan mengadakan pelaksanaan kegiatan riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil riset tersebut hanya dipergunakan bagi kepentingan ilmiah dan tidak dipergunakan untuk hal-hal lain yang akan merugikan Negara maupun Institusi;
2. Menjaga rahasia Instansi maupun Pejabat/Pegawai pada Instansi kami;
3. Laporan hasil riset harus disampaikan kembali kepada kami;
4. Hasil riset yang akan dipublikasikan harus dengan ijin Balai Besar KSDA Riau dan mencantumkan nama Balai Besar KSDA Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Balai Besar,
 Kepala Bagian Tata Usaha,

Hartono, S.P., M.Si.
 NIP. 197502192000031002

Tembusan:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan HR. Soebrantas No.01 Telp. (0765) 35022 Fax.(0765) 35022

DUMAI - RIAU

Dumai, 02 Maret 2023

Nomor : 600/ 29/PUPR-SEKR
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
NELVI RAHMADANI
di -
Dumai

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dumai. Nomor 0036/SKP/DPMPTSP/III/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Perihal Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia membantu memberikan data yang di perlukan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya di ucapkan terima kasih.



Pt. KEPALA

REZA FAHLEPI, ST

Penata Tk. I

NIP. 198308092009041001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Puteri Tujuh, Komplek Perumahan PEMDA No. 05 Dumai
 DUMAI – RIAU

Dumai, 09 Maret 2023

Nomor : 707/DLH-TU/156
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Melakukan Penelitian

Kepada Yth;
 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau Nomor:0036/DPMPSTSP/III/2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : **NELVI RAHMADANI**
 Nomor Mahasiswa : 11970524745
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan Penelitian dan memperoleh data untuk keperluan Akademik dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI** ”.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

KEPALA,


DAMERIA, SKM, M.Si
 Pembina Utama Muda/ (IV/c)
 NIP. 19640605 198603 2 006

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Halare
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nelvi Rahmadani, lahir pada tanggal 25 November 2001 di Kota Dumai. Penulis merupakan anak pertama (1) dari lima (5) bersaudara dari kedua orang tua yang begitu hebat, yaitu Ayah yang bernama Muhammad Ibrahim dan Ibu yang bernama Agustina. Penulis bersuku melayu,

berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 007 Purnama pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Dumai yang selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Dumai dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan Penulis aktif di beberapa organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Diantaranya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (DEMA FEIS), Himpunan Mahasiswi Program Studi Administrasi Negara, Komunitas FEIS Debate Club, Study Club Dinamika Publik, ISC Al-Iqtishodi, Ikatan Mahasiswa Kota Dumai (IMKD) Pekanbaru, Forum Diskusi Ekonomi Islam (ForDEI), dan Komunitas Global Oriented Students (Goodents). Penulis juga sempat mengikuti beberapa lomba karya tulis ilmiah serta melakukan penelitian bersama salah satu Dosen Administrasi Negara.

- © Hakcipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada semester 5, penulis kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kampung Buatan Batu (Sp.10), Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA DUMAI”** di bawah bimbingan Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si. Pada tanggal 16 Juni 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).